



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 68 Volume XVII / Desember 2021

21

CARBON TAX

DITERAPKAN DI PEMBANGKITAN PER 1 APRIL 2022

6

**RUPTL 2021-2030
DITERBITKAN,
PORSI EBT DIPERBESAR**

12

**TRIWULAN III 2021,
RASIO ELEKTRIFIKASI
TUNJUKKAN PENINGKATAN**

44

**PENGEMBANGAN KBLBB
HARUS DIIMBANGI
SDM KOMPETEN**



ISSN 2808-4578



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

PANDUAN PERIZINAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

[HTTP://KIOSK.DJK.ESDM.GO.ID](http://kiosk.djk.esdm.go.id)



INFORMASI SELENGKAPNYA:

Email: infogatrik@esdm.go.id
Ruang Pelayanan Publik Ditjen Gatrik: 021 5225180 ext 1123



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 68 Volume XVII / Desember 2021

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Kepala Bagian Rencana dan Laporan
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi
Kepala Sub Bagian Penyiapan Rencana & Program
Pandu Satria Jati
Anggita Miftah Hairani
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan laporan
Wisnu Pujiantoro
Fajar Rahmadhy
Khairiah Dewi
Syiful Barir
Hagni Surendro

Penyunting/Editor

Utami Hikmaasih
Agnes Tania

Desain Grafis

Aslan Firdaus
Agus Surahman

Fotografer

Rahmad Cahyo Nugroho
Additya Fitroh Firmansyah
Virbyansah Achmadan N
Agah Muhammad Abduh
Ajat Munajat

Sekretariat

Ulung Sukmana
Zaenal
Beni Hendrawan

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.gatrik.esdm.go.id

DARI REDAKSI

Pembaca setia Buletin Ketenagalistrikan,

Pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 dengan memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara Diseminesi RUPTL, Selasa (4/10) di Jakarta mengatakan bahwa RUPTL PLN 2021-2030 saat ini merupakan RUPTL lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6%, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%. Komitmen pemerintah dalam RUPTL ini merupakan salah satu upaya dalam mengakselerasi transisi energi.

Artikel terkait RUPTL dan upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi tersebut merupakan Tajuk Utama dalam Buletin Ketenagalistrikan Edisi 68 Volume XVII/Desember 2021.

Selain itu, baca juga berbagai berita terkait giat Ditjen Ketenagalistrikan dalam triwulan IV 2021. Terdapat beberapa kegiatan sosialisasi regulasi turunan UU Cipta Kerja yang perlu anda baca. Kami menerima artikel, saran, dan masukan dari anda yang dapat disampaikan kepada kami melalui email resmi.

Selamat membaca.

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

3

Dari Redaksi

4

Daftar Isi

Tajuk Utama

6

RUPTL 2021-2030 Diterbitkan, Porsi EBT Diperbesar

8

Peran Swasta Meningkatkan dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

9

Pemerintah Dorong Pemda Susun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

Liputan Khusus

10

Kuartal III 2021, Konsumsi Listrik Per Kapita Meningkat Capai 1.109 kWh

11

Mutu Layanan Ketenagalistrikan Meningkat pada Triwulan III/2021

12

Triwulan III 2021, Rasio Elektrifikasi Tunjukkan Peningkatan

14

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, 2022 Pemerintah Terapkan *Carbon Tax* Pada PLTU

Warta Kita

16

Ditjen Ketenagalistrikan gelar Bedah Buku: *Smart Grids From a Global Perspective*

17

Forum Konsensus Ketenagalistrikan 2021 Hasilkan 245 Unit Kompetensi Baru dan 98 Okupasi Jabatan Baru

18

Butuh Kolaborasi untuk Kembangkan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

20

Transisi Energi Tetap Perhatikan Keterjangkauan

21

Carbon Tax Diterapkan di Pembangkitan per 1 April 2022

22

Kementerian ESDM Dorong Peningkatan Kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan

24

Video Kreatif untuk Tingkatkan Kualitas Komunikasi Publik

25

Pembangunan Ketenagalistrikan Perlu Sinergi Dunia Pendidikan

26

Proyek PLTA Asahan 3 Diharap Tingkatkan Bauran Pembangkit EBT

- | | |
|--|--|
| <p>28 Ditjen Gatrik Dorong Konversi Kompor Induksi</p> <p>29 Momentum Peningkatan SDM Ketenagalistrikan di Hari Listrik Nasional 2021</p> <p>30 Dorong Kemudahan dan Kepastian Usaha Kelistrikan, KESDM Lakukan Analisis Tingkat Risiko Jasa Penunjang Tenaga Listrik</p> <p>31 Era Persaingan Global, Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Harus Penuhi Standardisasi Kompetensi</p> <p>32 Akselerasi Implementasi KBLBB Butuh Kolaborasi dan Inovasi</p> <p>33 Tingkatkan Keselamatan Ketenagalistrikan, Ditjen Gatrik Gelar Rapat Konsensus Teknis Sistem Ketenagalistrikan (KT 29-01)</p> <p>34 Pemerintah Dorong Penggunaan <i>Smart Grid</i> untuk Tingkatkan Penetrasi EBT</p> <p>35 Dukung Pemangkasan Emisi Karbon, KESDM Inisiasi Sistem <i>Cap and Trade Carbon</i></p> <p>36 <i>Sistem Online Single Submission (OSS)</i> Berbasis Risiko Permudah Pengajuan Perizinan Ketenagalistrikan</p> <p>38 Kolaborasi Tingkatkan Energi Hijau</p> | <p>39 Pengembangan Energi Surya Menjadi Prioritas Kebijakan Energi</p> <p>40 GGTC 2021: Mahasiswa Diminta Bersiap Hadapi Transformasi Digital Energi Listrik</p> <p>42 Pemerintah Dukung Inovasi Kelistrikan PT PLN (Persero)</p> <p>43 Upaya Ditjen Ketenagalistrikan untuk Maksimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>44 Pengembangan KBLBB Harus Diimbangi SDM Kompeten</p> <p>46 Dorong Pengembangan PLTS Atap, Pemerintah Terbitkan Aturan Terbaru</p> <p>47 Rasio Elektrifikasi Indonesia Naik Mencapai 99,4%</p> <p>48 Kementerian ESDM Ungkap Strategi Jaga Keandalan Listrik PON XX Papua</p> <p>49 10 Pembangkit Raih Penghargaan Subroto 2021 Bidang K2</p> <p>50 Lantik Pejabat Fungsional, Dirjen Gatrik: Berikan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat</p> <p>51 Agen Perubahan Ditjen Gatrik Selenggarakan Webinar Finansial untuk Pegawai Milenial</p> |
|--|--|

Kolom

- 52** Cerita Studi Dari Canberra, Kota Yang Gunakan 100% Energi Bersih
- 54** Walaupun Unit Kecil dan Terpenting, Apabila Berprestasi, Pasti akan Dicari (*Lesson Learned* Pembangunan Zona Integritas PPSDM Migas)

58

Daftar Regulasi

Daftar Regulasi Koleksi Perpustakaan
Ditjen Ketenagalistrikan
Semester 1 Tahun 2021

RUPTL 2021-2030 DITERBITKAN, PORSI EBT DIPERBESAR

Pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 dengan memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah 23% pada tahun 2025, sementara realisasi yang hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14%, menjadi perhatian serius dari Pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Webinar Diseminasi RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030, Selasa (4/10) di Jakarta.

"RUPTL PLN 2021-2030 saat ini merupakan RUPTL lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6%, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%," ujar Arifin.

Pemerintah Indonesia, sebut Arifin, terus terlibat aktif dalam memenuhi *Paris Agreement*. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen di sektor energi untuk dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan *Nationally Determined Contributions/NDC* pada tahun 2030 sebesar 29% dari Business as Usual (BaU) dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional. Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan roadmap menuju *Net Zero Emission* (NZE).

Tuntutan untuk industri menggunakan energi yang hijau dan penyediaan listrik dari sumber energi yang rendah karbon menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan energi di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan listrik

yang menyebabkan beberapa sistem besar seperti sistem kelistrikan Jawa-Bali dan sistem Sumatera berpotensi *over supply*.

"Oleh karena itu pertumbuhan listrik pada RUPTL sebelumnya sudah tidak sesuai, untuk itu pada RUPTL PLN 2021-2030 diproyeksikan hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,9%, dari yang sebelumnya 6,4%. Program 35.000 MW juga berjalan terus dan dalam dua tahun ke depan akan masuk sekitar 14.700 MW yang sebagian besar dari PLTU Batubara. Selain itu, data per akhir Juni 2021, Rasio Elektrifikasi rata-rata nasional telah mencapai 99,37%. Namun masih terdapat beberapa provinsi yang masih perlu perhatian khusus yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua," jelas Arifin

Tantangan-tantangan tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUPTL PLN 2021-2030. Dari serangkaian diskusi yang cukup panjang antara Pemerintah dan PT. PLN (Persero) serta memperhatikan masukan dari Kementerian dan Lembaga terkait, maka telah berhasil dirumuskan RUPTL PLN 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021.

"Dengan memperhatikan kondisi PLN, RUPTL PLN 2021-2030 dapat menjawab semua permasalahan di sektor ketenagalistrikan," Arifin menambahkan.

Dalam rangka mencapai target penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW selama 10 tahun kedepan dan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan investasi PLN, pemerintah memutuskan bahwa RUPTL ini membuka peran IPP lebih besar termasuk dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT. Dalam RUPTL ini tidak ada lagi rencana PLTU baru kecuali yang sudah comitted dan konstruksi, hal ini juga membuka ruang yang cukup besar



Webinar Diseminasi RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030, Selasa (4/10) di Jakarta.

untuk pengembangan EBT menggantikan rencana PLTU dalam RUPTL sebelumnya.

"Dengan kecenderungan harga PLTS yang semakin murah dan masa pembangunan lebih cepat, untuk pencapaian target 23% bauran EBT pada tahun 2025, porsi PLTS didorong lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya. Selain itu, pencapaian target bauran EBT akan dipenuhi oleh Cofiring PLTU dengan Biomasa dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan *feedstock*," imbuhnya.

Arifin juga mengungkapkan, untuk meningkatkan keandalan listrik dan meningkatkan penetrasi EBT yang lokasi sumber energinya jauh dari pusat demand listrik, maka Pemerintah mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan dalam pulau maupun antarpulau.

"Pada tahun 2024 diharapkan interkoneksi di dalam Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana Pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Selanjutnya dilakukan kajian untuk interkoneksi antar-pulau yang disebut dengan *Super Grid* yang menghubungkan antar pulau besar di Indonesia. Dalam hal ini, selain meningkatkan keandalan juga dapat mengatasi adanya *over supply* di suatu sistem besar," tandasnya.

Pemerintah juga terus berupaya agar seluruh desa di daerah 3T dapat memperoleh akses listrik untuk mendukung target Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2022. Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang baru daya listrik juga menjadi perhatian pemerintah. Direncanakan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 80.000 sambungan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui anggaran APBN yang direncanakan Kementerian ESDM.

Untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan penyaluran tenaga listrik bagi masyarakat perdesaan di 3T yang selama ini dilayani oleh pembangkit listrik diesel, pemerintah mendorong Program Dedieselisasi melalui penggantian PLTD dengan Pembangkit EBT sesuai dengan potensi energi terbarukan setempat. Selain itu, Pemerintah juga mendorong Program PLTS *Rooftop* dalam rangka meningkatkan peran serta konsumen dalam penggunaan energi bersih.

Transmisi Listrik Juga Jadi Perhatian Khusus

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan bahwa selain perencanaan pembangkitan, rencana pembangunan transmisi juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), penyaluran energi listrik dari daerah yang *over supply* ke daerah yang defisit, penyaluran

listrik ke daerah Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Smelter, dan lain-lain.

"Pemerintah juga fokus meningkatkan pemanfaatan sumber daya EBT ke pusat beban, mengingat potensi EBT jauh dari pusat beban listrik. Rencana pembangunan jaringan distribusi bagi masyarakat yang belum teraliri listrik dan peningkatan jam nyala menjadi 24 jam pada sistem *isolated*, juga menjadi perhatian dari Pemerintah dan PLN," tambah Rida menjelaskan.

Rida menegaskan bahwa Pemerintah dan PLN sangat berhati-hati dalam menyusun RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 baik dari sisi kebutuhan demand listrik maupun dari sisi perencanaan pembangkitan, transmisi dan distribusi. Mempertimbangkan keterbatasan kemampuan investasi, saat ini PLN didorong untuk lebih fokus berinvestasi pada pengembangan dan penguatan sistem penyaluran tenaga listrik serta peningkatan pelayanan konsumen.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa PLN akan berupaya melakukan peningkatan *demand* dengan program pemasaran yang agresif seperti kompor induksi, kendaraan listrik (EV) dan upaya lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya demand baru di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan yang lainnya.

"Pada sisi infrastruktur PLN akan meminimalkan penambahan kapasitas infrastruktur baru dan melaksanakan relokasi pembangkit PLTG/GU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset serta melaksanakan negosiasi penyesuaian jadwal, baik itu kepada IPP pembangkit maupun penyedia bahan bakar," tambah Zulkifli.

Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana direncanakan dalam RUPTL ini memerlukan sinergi antara PLN dan peran serta seluruh stakeholders. Pihak Swasta, badan usaha pengembang/IPP dan Lembaga Pendanaan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan investasi yang sangat besar dalam mewujudkan instalasi ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan.

"Terakhir kami menghimbau kepada seluruh *stakeholders* untuk saling bersinergi, bahu membahu mewujudkan instalasi tenaga listrik yang aman, andal, ramah lingkungan, dan lebih hijau sesuai RUPTL PLN 2021-2030. Kami imbau agar PLN dapat melaksanakan RUPTL ini sesuai dengan rencana, akan sia-sia jika RUPTL yang telah disepakati bersama, tidak dilanjutkan ke tahap pengadaan dan direalisasikan. Kami minta seluruh infrastruktur yang direncanakan dalam RUPTL ini dapat COD tepat waktu," tutup Arifin. (UHA/DKD)

PERAN SWASTA MENINGKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam PYC International Energy Conference 2021 secara daring

Dalam pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan ditingkatkan. Sebesar 64,8% dari total pembangkit listrik 40,6 GW yang akan dibangun hingga 10 tahun ke depan direncanakan akan dikembangkan oleh swasta. Sektor swasta juga mengembangkan 56,3% dari total 20,9 GW pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan hal tersebut dalam *PYC International Energy Conference 2021* secara daring, Kamis (7/10/2021).

"Sektor swasta akan mengembangkan 63,7% dari total 4.680 MWP pembangkit listrik tenaga surya PV. Khusus untuk PLTS *on-grid*, swasta akan mengembangkan 54,4% dari total 3.236 MWP," Rida mengungkapkan.

Ia menyebut RUPTL PLN 2021-2030 sebagai "RUPTL hijau" karena porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6%, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%.

Rida lantas mengatakan bahwa rasio elektrifikasi ditargetkan 100% pada 2022 dalam RUPTL 2021-2030. Keseimbangan daya untuk setiap sistem

ketenagalistrikan juga menjadi perhatian untuk memastikan pasokan listrik yang memadai. Pemerintah juga berkomitmen untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% mulai tahun 2025 dan menjaga agar biaya produksi listrik tidak meningkat.

"Tidak ada lagi penambahan PLTU, kecuali yang sudah *financial closing* atau konstruksi," Rida menegaskan.

Selain itu, RUPTL ini juga fokus pada percepatan interkoneksi ketenagalistrikan dalam-pulau maupun antarpulau. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, menurunkan biaya produksi listrik, serta meningkatkan penetrasi EBT yang lokasi sumber energinya jauh dari pusat *demand* listrik.

Dalam kesempatan yang sama, Rida juga menyampaikan upaya Pemerintah untuk melistriki daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses listrik.

"Pendekatan pertama, yaitu perpanjangan sambungan listrik secara *on grid*. Artinya, ada perpanjangan jaringan PLN ke desa atau rumah yang berdekatan dengan jaringan PLN. Program ini dilakukan untuk 24 desa pada tahun 2021," ujarnya.

Rida selanjutnya menjelaskan pendekatan kedua, yakni melalui program mini-grid. Pendekatan ini berbasis EBT dan dilakukan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Tahun ini, program *mini-grid* dilakukan pada 37 desa. Pendekatan ketiga adalah dengan melakukan pengadaan 20.711 Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL/tabung listrik) untuk 285 desa.

"Anggaran untuk pengadaan tersebut disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui APBN. Sedangkan PLN menyediakan Stasiun Penyediaan Energi Listrik (SPEL)," pungkas Rida.

PYC International Energy Conference adalah konferensi para pakar energi berskala internasional yang diselenggarakan oleh The Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Untuk tahun ini, pelaksanaan konferensi dilakukan pada 6-7 Oktober 2021 dengan tema "*The Enhancement of Energy Security for a Sustainable Future*". Pembicara dalam konferensi ini berasal dari lintas negara untuk membahas tentang sektor energi yang terbagi menjadi empat bidang, yakni kelistrikan, batubara, minyak dan gas (migas), serta energi baru terbarukan. (AMH)

PEMERINTAH DORONG PEMDA

SUSUN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi tujuh provinsi yang telah berkontribusi dalam perencanaan ketenagalistrikan melalui penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Ketujuh provinsi yang telah menetapkan RUKD tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, dan Provinsi Lampung. Penetapan RUKD ini merupakan hal yang penting karena menjadi dasar pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad dalam Webinar Sosialisasi Tata Cara Penyusunan RUKD dan RUPTL Serta Pelaporan RUPTL, Kamis (11/11/2021). Munir menyampaikan sambutan mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. "Terdapat 2 mekanisme keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan, pertama melalui proses penyusunan RUKN dan yang kedua melalui RUKD," ujar Munir.

Lebih lanjut Munir menjelaskan, perencanaan ketenagalistrikan baik RUKN, RUKD maupun RUPTL berlandaskan asumsi dan target, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan dilakukan pemutakhiran secara berkala apabila terdapat perbedaan signifikan antara asumsi dan target dengan realisasinya.

Munir mengungkapkan bahwa dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa RUKN ditetapkan oleh Menteri, RUKD ditetapkan oleh Gubernur, dan pengesahan RUPTL oleh Menteri atau Gubernur

sesuai kewenangannya.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi bahwa ketenagalistrikan dikuasai oleh Negara.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pembinaan Program Jisman Hutajumenambahkan, "Kami berharap dinas daerah bisa segera menetapkan RUKD, karena penyusunan RUKD akan dimasukkan ke dalam RUKN sebagai acuan dari RUPTL."

Senada dengan Jisman, Koordinator Penyiapan Program Ketenagalistrikan Husni Safruddin mengatakan bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi, realisasi penjualan listrik di wilayah usaha serta perubahan regulasi, diharapkan agar para pengembang Wilayah Usaha segera menyesuaikan dan mengajukan usulan pengesahan perubahan RUPTL di wilayah usahanya masing-masing.

Pemerintah mencatat saat ini terdapat sejumlah 55 pemegang Wilayah Usaha yang sesuai regulasi wajib menyusun RUPTL dan melaporkan secara berkala realisasi pelaksanaan RUPTL tersebut.

Sumber Daya Mineral, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha

Ketenagalistrikan.

Tata cara penyusunan dan pelaporan RUPTL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan

"Pembinaan dan Pengawasan Realisasi RUPTL merupakan salah satu langkah penting Pemerintah dalam mengawal pencapaian target bauran EBT 23% tahun 2025 sesuai KEN dan RUKN," ungkap Subkoordinator Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan M.Kuncoro sebagai salah satu narasumber webinar tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa sinkronisasi perencanaan ketenagalistrikan sangatlah krusial terutama dalam menghindari agar tidak terjadi kondisi *over supply* atau sebaliknya kekurangan *supply* masa depan yang berdampak pada efisiensi penyediaan tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik" tutup Munir. (AT)



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam Webinar Sosialisasi Tata Cara Penyusunan RUKD dan RUPTL Serta Pelaporan RUPTL, Kamis (11/11/2021).

Sumber: Freepix.com

KUARTAL III 2021, KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA MENINGKAT CAPAI 1.109 KWH

Pemerintah mencatat konsumsi listrik meningkat mencapai 1.109 kWh per kapita di kuartal III 2021 per September 2021. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam konferensi pers virtual Capaian Kinerja Triwulan III 2021 dan Isu-Isu Terkini Subsektor Ketenagalistrikan, Kamis (21/10/2021).

"Konsumsi listrik per kapita 92,2 persen karena kami targetkan 1.203 kWh per kapita, saat ini baru mencapai 1.109 kWh per kapita," ujar Rida.

Dalam upaya meningkatkan konsumsi listrik, pemerintah menyusun strategi untuk menciptakan permintaan baru dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi listrik.

Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi salah satu upaya pemerintah menarik

minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Sebanyak 187 unit SPKLU sudah beroperasi hingga September 2021 ini. SPKLU tersebut tersebar di 155 lokasi di seluruh Indonesia. Dan jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah mencapai 153 unit yang tersebar di 86 lokasi sudah terpasang di Jakarta dan Tangerang demi menunjang infrastruktur ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Percepatan KBLBB, telah mempunyai payung hukum tersendiri. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB.

Terkait jumlah pelanggan listrik, Rida mengatakan telah melebihi target sepanjang tahun 2021, dengan capaian saat ini telah mencapai 81,229 juta pelanggan atau setara 102,6 persen dari

target sebanyak 79,187 juta pelanggan. Sementara realisasi tahun 2020 lalu sebanyak 78,663 juta.

"Dari sisi jumlah pelanggan, kita sudah hampir 103 persen dari target," ungkap Rida.

Pernyataan Rida tentang peningkatan konsumsi listrik senada dengan pernyataan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Zulkifli mengatakan konsumsi listrik yang kian membaik mencerminkan terjadinya pemulihan ekonomi.

"Ini menandakan bahwa perekonomian sudah kembali pulih. Aktivitas industri dan perekonomian sudah kembali pulih. Diharapkan, kondisi ini terus membaik dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang positif," ujar Zulkifli dalam Siaran Pers PLN, Sabtu (16/10/2021). (AT)



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam konferensi pers virtual Capaian Kinerja Triwulan III 2021 dan Isu-Isu Terkini Subsektor Ketenagalistrikan, Kamis (21/10/2021).

MUTU LAYANAN KETENAGALISTRIKAN MENINGKAT PADA TRIWULAN III/2021

Mutu layanan ketenagalistrikan meningkat pada triwulan III/2021. Hal ini terlihat dari capaian *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) yang membaik dibanding capaian tahun lalu. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers virtual Capaian Subsektor Ketenagalistrikan pada triwulan III/2021, Kamis (21/10/2021).

SAIDI adalah ukuran seberapa lama padam, sementara SAIFI adalah ukuran seberapa sering padam. Makin kecil capaiannya dari target, maka makin bagus.

"Hingga triwulan III/2021, capaian SAIDI nasional mencapai 6,62 jam/pelanggan/tahun. Sedangkan target 2021 adalah 10 jam/pelanggan/tahun. Ini lebih kecil dibanding realisasi tahun 2020 yang mencapai 12,72 jam/pelanggan/tahun," ujar Rida.

Sementara itu, capaian SAIFI nasional hingga triwulan III/2021 4,96 kali/pelanggan/tahun. Sedangkan target 2021 adalah 8 kali/pelanggan/tahun dan realisasi tahun 2020 mencapai 9,25 kali/pelanggan/tahun.

"Jadi kini sudah jarang mati lampu dan walaupun mati lampu juga sebentar saja," kata Rida.

Ia lalu menyampaikan kondisi pasokan listrik saat ini. "Yang pasti kondisi listrik lebih dari cukup saat ini dan hingga akhir tahun tidak ada kenaikan tarif listrik," Rida menegaskan.

Rida lantas menjelaskan upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menjamin *supply chain energi* terutama batu bara. Ia mengatakan komoditas batu bara dan *Liquid Natural Gas* (LNG) sedang naik dan beberapa negara mulai mengalami krisis listrik dan membakar batu bara lebih banyak lagi untuk menjaga ketahanan energinya.

"Kita di Indonesia bersyukur punya batu bara, gas, dan lebih dari itu, dibanding negara lain kita malah sudah mengatur untuk lebih menjamin pasokan. Misal ada DMO (*domestic market obligation-red*) batu bara dan DMO gas. Jadi tidak boleh seluruhnya untuk diekspor meskipun harga lebih bagus. Ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui DMO. Baik itu volumenya tapi juga harganya. Artinya negara hadir dan menjamin listrik tetap ada karena sudah diregulasi oleh Pemerintah," Rida menjelaskan.

Terkait tantangan dalam *supply chain* terutama batu bara, Rida menyebut hal

tersebut sudah menjadi perhatian Pemerintah agar dapat ditangani. Salah satunya tantangan cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir sehingga dapat mengganggu pasokan batu bara.

"Untuk menjaga pasokan energi baik di Migas, Minerba, listrik, maupun EBTKE, Kementerian ESDM membentuk tim khusus yang *day by day* melototin dan mengawal rantai pasok," tutur Rida.

Dalam konferensi pers tersebut, Rida juga memaparkan capaian kinerja mulai dari penambahan infrastruktur pembangkit, transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, hingga gardu distribusi.

Kapasitas penambahan pembangkit listrik di Indonesia pada triwulan III/2021 mencapai 936,62 MW. Sementara, transmisi listrik terdapat penambahan sebesar 1.910,06 kms. Penambahan jaringan distribusi sebesar 9.915,63 kms, sedangkan kapasitas Gardu Induk bertambah 4.521 MVA. Penambahan Gardu Distribusi disampaikan terdapat peningkatan sebesar 1.002,63 MVA. (AMH)



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan paparan dalam konferensi pers virtual Capaian Subsektor Ketenagalistrikan pada triwulan III/2021, Kamis (21/10/2021).

TRIWULAN III 2021, RASIO ELEKTRIFIKASI TUNJUKKAN PENINGKATAN



Rasio Elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hingga triwulan III 2021, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,39%. Angka ini meningkat dari akhir tahun 2020 yang mencapai 99,2%. Pemerintah memiliki berbagai upaya untuk mengejar elektrifikasi di daerah-daerah, salah satunya dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Kamis (21/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut Rida menyoroti beberapa daerah yang rasio elektrifikasinya lebih rendah daripada rasio elektrifikasi nasional seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua dan Kalimantan Barat akan menjadi prioritas agar minimal rasio elektrifikasinya segera sama dengan daerah-daerah lain.

"Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman PLN agar keempat provinsi ini menjadi perhatian sehingga rasio elektrifikasinya minimal sama dengan yang lain," ucap Rida. Dalam konferensi pers tersebut, Rida mengatakan

bahwa salah satu upaya peningkatan rasio elektrifikasi adalah dengan melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA bagi Rumah Tangga (RT) miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berdomisili di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), namun didepannya telah dilewati jaringan tegangan rendah PLN.

"Program BPBL dilaksanakan dengan menggunakan dana CSR Badan Usaha dan atau APBN," ucap Rida.

Hingga bulan September 2021, pelaksanaan BPBL dengan CSR Badan Usaha sudah mencapai 13.583 sambungan. Jika ditotal dari awal pelaksanaan BPBL, telah terpasang 37.695 sambungan listrik melalui program ini.

Rida menjelaskan strategi pemerintah untuk melistriki daerah-daerah belum terlistriki. Strategi pertama adalah melalui Perluasan Jaringan (*Grid Extension*). Strategi ini adalah dengan penyambungan desa dan/atau rumah tangga yang dekat dengan grid PLN. Dari target 61 desa yang akan dilistriki melalui

perluasan jaringan, seluruh desa telah tersambung.

Strategi kedua adalah dengan *Mini Grid* atau Pembangunan pembangkit berbasis EBT setempat. Strategi ini dikhususkan untuk kelompok masyarakat yang tinggal daerah yang sulit dijangkau. Hingga triwulan III, 46 desa telah menyala dari target 75 desa yang akan dibangun *minigrid*.

Strategi terakhir adalah dengan dengan pembangunan pembangkit EBT yang dikombinasikan dengan pembangunan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan pembagian Salat Penyalur Daya Listrik (APDAL) untuk masyarakat yang bermukim tersebar (*scattered*). Rida menyampaikan bahwa Penyediaan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) untuk 37 desa akan melalui APBN KESDM 2021 dan 12 desa melalui CSR PLN, sedangkan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) oleh PLN.

Berbagai upaya di atas merupakan strategi Kementerian ESDM untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100%. Kerjasama dan komunikasi terus dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, serta PLN dan masyarakat terkait. (PSJ)



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Kamis (21/10/2021)

KURANGI EMISI GAS RUMAH KACA, 2022 PEMERINTAH TERAPKAN *CARBON TAX* PADA PLTU



"Semangatnya adalah mereduksi emisi pembangkit, jadi pembangkit juga harus ada upaya untuk menambah porsi pembangkit hijau, misalnya mencampur biomassa, atau memakai PLTS atap, itu bisa diperhitungkan sebagai upaya mereduksi emisi."

Rida Mulyana

Pemerintah terus mengupayakan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemerintah menyiapkan penerapan *Cap and Tax* (Skema Pajak Carbon) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada tahun 2022 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan III 2021 di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

"Nantinya akan ada Undang-Undang pajak baru pada tahun 2022, dimana didalamnya ada Undang-Undang

Carbon atau *Carbon Tax*," ungkap Rida. Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menginisiasi sistem *cap and trade carbon* melalui uji coba jual beli karbon di subsektor ketenagalistrikan, khususnya di lingkungan PLTU yang sifatnya masih *voluntary* yang telah dilakukan pada Maret-Agustus 2021 lalu.

Pemerintah menyiapkan peta pajak karbon nantinya akan berlaku dalam dua skema, yakni skema perdagangan karbon (*cap and trade*) dan skema pajak karbon (*cap and tax*).

Pada skema perdagangan karbon (*cap and trade*), pembangkit yang menghasilkan emisi lebih dari cap yang telah ditetapkan diharuskan membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) pembangkit lain yang emisinya di bawah cap. Selain itu, pembangkit juga dapat membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE).

Pada skema (*cap and tax*), jika pembangkit tersebut tidak dapat membeli SIE atau SPE secara penuh atas kelebihan emisi yang dihasilkan, maka akan diberlakukan skema cap and tax, yakni sisa emisi yang melebihi cap akan dikenakan pajak karbon.

"Aturan mainnya adalah untuk yang emisinya lebih rendah dibawah cap maka dia bisa menjual Sertifikat Izin Emisi atau Sertifikat Penurunan Emisi kepada PLTU yang memiliki kelebihan. Untuk yang emisinya tidak bisa dipenuhi dengan SIE maka akan diterapkan pajak carbon, dan yang pasti besaran pajaknya tidak akan lebih murah dari besaran *trade*," ungkap Rida menjelaskan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi GRK ini sejalan dengan *Paris Agreement* dimana pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sekitar 880 juta ton karbon dioksida (Co2) pada 2030.

"Semangatnya adalah mereduksi emisi pembangkit, iadi pembangkit juga harus ada upaya untuk menambah porsi pembangkit hijau, misalnya mencampur biomassa, atau memakai PLTS atap, itu bisa diperhitungkan sebagai upaya mereduksi emisi. Jadi memang tujuan kita adalah semangat mereduksi GRK," tutup Rida. (U)



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Kamis (21/10/2021)

Sumber: Freepik.com

DITJEN KETENAGALISTRIKAN GELAR BEDAH BUKU

Smart Grids from a Global Perspective



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengapresiasi diskusi terkait upaya mempercepat implementasi *smart grid* di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad dalam acara Bedah Buku "*Smart Grids From a Global Perspective*", Kamis (25/11/2021).

"Kami berharap dengan diskusi ini, muncul keinginan untuk membaca dan mendapatkan gambaran untuk mempercepat implementasi *Smart Grid* di Indonesia," ujar Munir.

Acara ini merupakan acara bedah buku yang ke-empat dan merupakan kegiatan rutin Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, khususnya dari Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan, untuk meningkatkan budaya literasi dan menambah wawasan para pegawai dan pemangku kepentingan tentang program dan kebijakan di subsektor ketenagalistrikan.

Buku "*Smart Grids from a Global Perspective: Bridging Old and New Energy Systems*" yang ditulis oleh Beaulieu, Anne, de Wilde, Jaap, Scherpen, Jaquelin M.A. (Eds) menjelaskan pendekatan lintas disiplin terhadap *smart grid*, menawarkan dasar yang sangat berharga untuk memahami kompleksitas dan potensinya, dan pembahasan terkait aspek teknis, hukum, ekonomi, sosial, psikologis, dan keamanannya.

Munir menyampaikan *smart grid* merupakan fenomena perkembangan teknologi dalam sistem ketenagalistrikan. *Smart grid* memanfaatkan komunikasi dan informasi dua arah yang dapat membuat sistem tenaga listrik menjadi lebih optimal dan efisien. Tak hanya dapat mengoptimalkan sistem tenaga listrik, *Smart Grid* dipercaya dapat meningkatkan mutu dan keandalan tenaga listrik.

Pemerintah mendorong pengembangan *smart grid* untuk dapat diterapkan di Indonesia dan mengharapkan adanya gambaran untuk mendukung regulasi pengembangan dan penerapan *Smart Grid* di Indonesia.

Smart grid telah masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan, khususnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2021-2030.

"Kami mengharapkan penerapan teknologi *smart grid* ini dapat segera diimplementasikan menyusul perkembangan teknologi di negara lain," ungkap Munir.

Pembedah buku pada acara tersebut Fadolly Ardin, S.T, M.T, Analis Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, dan Desti Alkano, Ph.D., penulis buku dan *co-founder Energy Academy Indonesia* (Ecadin).

Desti mengungkapkan, "Tak hanya untuk meningkatkan literasi, tetapi acara ini dapat memfasilitasi diskusi antara konsep *smart grid* yang sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara Eropa dan yang Indonesia persiapkan dalam pengembangan dan pengimplementasian konsep *smart grid*."

Munir berharap apa yang akan disampaikan oleh para Narasumber dan didiskusikan oleh seluruh peserta dapat menambah wawasan, khususnya dalam memahami lebih dalam mengenai *Smart Grid*.

"Kami berharap Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan dapat menjadi pusat pengetahuan modern berbasis Teknologi Informasi yang dapat menunjang visi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan," tutup Munir. (AT)

FORUM KONSENSUS KETENAGALISTRIKAN 2021 HASILKAN 245 UNIT KOMPETENSI BARU DAN 98 OKUPASI JABATAN BARU

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar Forum Konsensus Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Kamis (25/11/2021), secara *hybrid* di Jakarta dan melalui Zoom.

Forum Konsensus 2021 ini menghasilkan 245 unit kompetensi baru dan 98 okupasi jabatan baru. Standar kompetensi yang disusun terdiri dari empat bidang, yakni Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik, Instalasi Transmisi Tenaga Listrik, Instalasi Distribusi Tenaga Listrik, dan Standar Kompetensi yang berkaitan dengan Usaha Penjualan Tenaga Listrik.

“Saya cukup berbangga saat ini kita sudah menambah lingkup kompetensi kita. Yang kami catat di antaranya paling tidak tahun ini kita sudah mulai mau melaksanakan standar kompetensi untuk sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar saat membuka acara.

Wanhar menyampaikan penerapan standar kompetensi merupakan serangkaian kegiatan penggunaan standar yang diberlakukan wajib. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan perumusan standar latihan oleh lembaga diklat terakreditasi dan proses sertifikasi kompetensi tenaga teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).

“Dengan demikian, penerapan standar kompetensi diharapkan mampu mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagai penggerak pembangunan ketenagalistrikan,” Wanhar menambahkan.

Ia lantas mengungkapkan pentingnya tenaga teknik ketenagalistrikan untuk memiliki daya saing. Terlebih dengan

terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya khususnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dapat mendorong iklim investasi yang positif.

Dengan kemudahan berusaha khususnya pada subsektor ketenagalistrikan, Pemerintah juga tetap menjaga kualitas pemenuhan aspek kondisi yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

“Permen ESDM Nomor 6/2021 diharapkan mampu menjawab tantangan terkait kondisi investasi dan pemenuhan kaidah keselamatan ketenagalistrikan,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga teknik di Indonesia melalui penyandingan dan pemutakhiran (*update*) standar kompetensi serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

“Pemerintah juga akan terus mendorong potensi dalam negeri menjadi prioritas utama khususnya tenaga teknik yang kompeten. Ke depan diharapkan tenaga teknik kita dapat berperan lebih besar pada pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia, serta diakui secara internasional,” pungkash Wanhar.

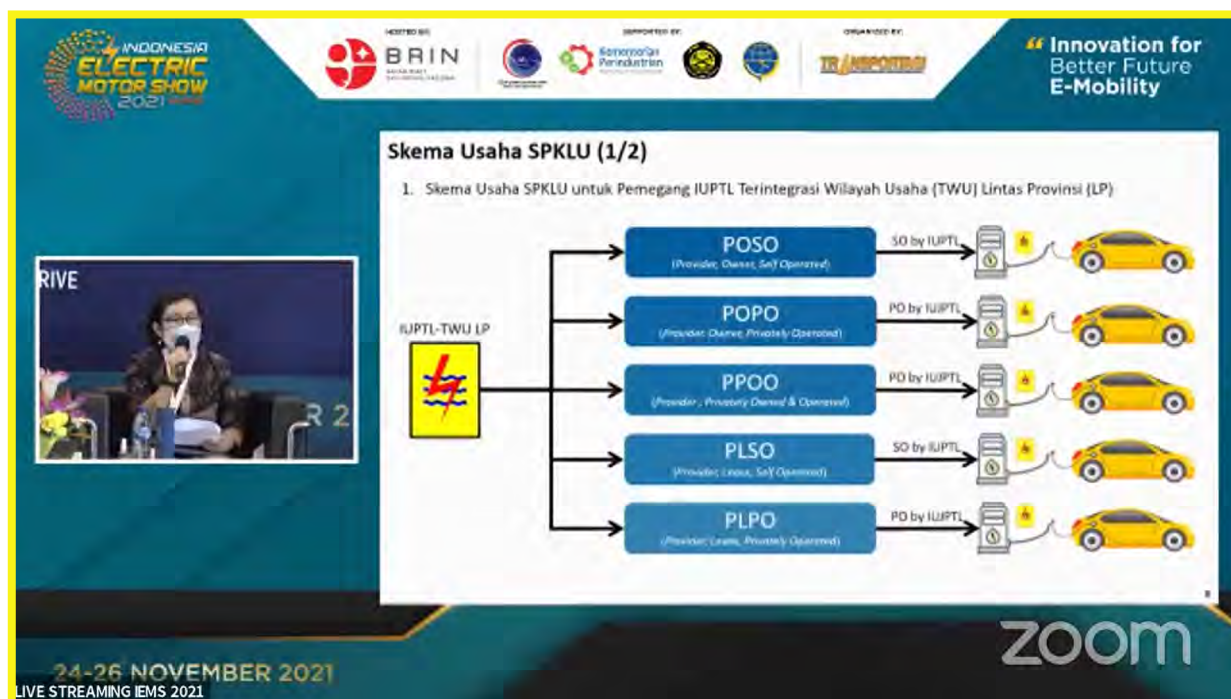
Sebagai informasi, peserta Forum Konsensus berasal dari kementerian/lembaga, badan usaha subsektor ketenagalistrikan, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi kompetensi, serta asosiasi profesi di bidang ketenagalistrikan. (AMH)



Forum Konsensus Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Kamis (25/11/2021)

BUTUH KOLABORASI UNTUK KEMBANGKAN EKOSISTEM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB)

Untuk menciptakan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) perlu adanya dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak. Dukungan tersebut dapat berupa insentif fiskal dan nonfiskal, dukungan riset agar komponen KBLBB dapat menjadi produk domestik dengan harga yang kompetitif, juga dukungan sektor keuangan baik bank maupun nonbank untuk memberikan produk-produk pembiayaan. Demikian disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Indonesia *Electric Motor Show* (IEMS) 2021, Rabu (24/11/2021), di Tangerang Selatan.



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menyampaikan pada Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021, Rabu (24/11/2021)

Ida lalu menambahkan perlunya menciptakan initial market dengan cara mendorong penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas/operasional di lingkungan Pemerintah maupun angkutan umum, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Perlu dukungan pemerintah dan lainnya untuk menciptakan sistem KBLBB di Indonesia terutama dalam mengembangkan industri KBLBB termasuk industri *pioneer*," ujarnya.

Moeldoko menyebut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan dilatarbelakangi oleh tiga aspek. Ketiga aspek tersebut adalah aspek lingkungan dan konservasi, aspek efisiensi dan ketahanan energi nasional, aspek peningkatan kapasitas industri dan kemampuan daya saing nasional.



Sumber: Freepik.com

Untuk aspek lingkungan dan konservasi, Moeldoko berkata Pemerintah Indonesia memiliki semangat kuat untuk menekan emisi. Komitmen ini diperkuat lagi pada pertemuan COP26 di Glasgow untuk mencapai *Net Zero Emission (NZE)* pada 2060.

“Terkait aspek efisiensi, sampai dengan saat ini kita masih memerlukan BBM hingga 1,8 juta barel per hari. Kita baru bisa memproduksi sekitar 700 ribu barel per hari. Devisa kita luar bisa tersedot. Kalau ini dibiarkan, dan kita tidak segera menuju mengembangkan mobil listrik, maka semakin tidak *balance*. Kebutuhan energi semakin meningkat, tapi *lifting* kian menurun. Kita bisa semakin kedodoran. Dengan hadirnya transisi atau tranformasi energi itu membuat Indonesia jadi efisien,” Moeldoko menjelaskan.

Untuk aspek peningkatan kapasitas dan daya saing nasional, menurutnya mobil listrik diharapkan dapat menjadi lompatan besar di bidang teknologi dan industri mobil di Indonesia.

Insentif untuk Percepat KBLBB

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menyampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan berbagai stimulus untuk mendorong percepatan penggunaan KBLBB. Kemudahan dan keringanan diberikan kepada pemilik KBLBB serta pemilik instansi privat dan badan usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

“Kalau mau tambah daya misal di rumah untuk pelanggan PLN *home charging* bisa dikasih murah bayarnya untuk pelanggan PT PLN (Persero),” tutur Ida.

Sebagai informasi, pemilik KBLBB mendapatkan biaya pasang spesial untuk tambah daya. Tambah daya hingga 1.000 VA biayanya Rp150.000 untuk 1 fasa, sedangkan tambah daya hingga 16.500 VA biayanya Rp450.000 untuk 3 fasa. Ada pula insentif tarif tenaga listrik *home charging* yakni diskon 30% selama tujuh jam pada pukul 22.00–05.00.

Selain itu, pemilik instansi privat dan badan usaha SPKLU dan SPBKLU juga diberi keringanan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13

Tahun 2020, di antaranya adalah penetapan tarif curah dan penetapan faktor pengali N sebesar 1,5 bagi pemilik KBLBB yang mengisi daya di SPKLU PLN. Selain itu, ada pula pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama, keringanan biaya penyambungan, dan keringanan jaminan langganan tenaga listrik.

Ida menyampaikan Kementerian ESDM juga mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 yang mempermudah perizinan usaha untuk SPKLU.

“Sebelumnya, kalau ada Badan Usaha mau berkomitmen untuk membangun SPKLU mereka harus mengajukan penetapan Wilayah Usaha dan butuh rekomendasi gubernur. Tetapi sejak adanya Permen ESDM 5/2021, tidak diperlukan lagi rekomendasi dari gubernur. Cukup menyampaikan dokumen dan ditembuskan ke gubernur atau pejabat yang mempunyai kewenangan. Ini adalah upaya untuk mempercepat ekosistem KBLBB,” Ida mengungkapkan.

IEMS 2021 adalah rangkaian kegiatan pameran, seminar dan diskusi mengenai kendaraan bermotor listrik yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada 24–26 November 2021 dengan mengambil tema *Innovation for Better Future e-Mobility*. (AMH)

TRANSISI ENERGI



Pemerintah terus berupaya mencanangkan berbagai program menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Salah satunya adalah dengan transisi energi dengan mendorong pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menggantikan pembangkit fosil. Namun proses transisi energi dari fosil ke EBT tersebut harus tetap memperhatikan ketverjangkauan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam acara *The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021* dengan tema "*Energy Transition Scenario Towards Net Zero Emission*" di Jakarta, (23/11/2021).

Lebih lanjut Jisman menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung sebagai pemanfaatan waduk di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan tujuan mengurangi pengeluaran biaya lahan untuk PLTS sehingga bisa menekan RPP.

juga menghitung dengan sangat cermat bagaimana keseimbangan neraca daya listrik pada setiap sistem koneksi, suplai dan demand listrik harus seimbang sesuai dengan formula 30% daya sebagai reserve margin.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Operasi II PT Indonesia Power Bambang Anggono menyampaikan bahwa PT Indonesia power mendukung usaha pemerintah dalam transisi energi menuju *Net Zero Emission*.

Jisman menyatakan bahwa saat ini pasokan listrik Indonesia sudah mencukupi dan ini saat yang tepat untuk menjalankan program transisi energi di pembangkitan kelistrikan nasional dari energi fosil ke energi EBT.

"Kita pastikan RUPTL 2021-2030 sudah green, porsi pembangkit EBT vs Fosil lebih besar yaitu 52% banding 48%, dengan demikian kita berharap RUPTL ini bisa membuat emisi karbon lebih rendah," tutup Jisman. (U)

CARBON TAX

DITERAPKAN DI PEMBANGKITAN PER 1 APRIL 2022

Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan penurunan emisi dalam kontribusi pencapaian *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Salah satunya adalah dengan penerapan *Carbon Tax* (Pajak Karbon) yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022 nanti sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak karbon akan diterapkan pada pembangkit berbahan bakar batubara mulai 1 April 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, Senin (15/11/2021).

"Mulai 1 April 2022, Carbon Tax akan diterapkan di sektor PLTU batubara dengan skema *cap and tax*, dengan tarif pajak karbon yang ditetapkan paling rendah Rp30,- per kg CO₂e," ungkap Arifin.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan peta jalan pelaksanaan pajak karbon adalah dimulai dari tahun 2021 dengan penyiapan pengembangan mekanisme perdagangan karbon, kemudian di tahun 2022-2024 akan diberlakukan penerapan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (*cap and tax*) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

"Selanjutnya pada tahun 2025 dan seterusnya dilakukan Implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai kesiapan sektor terkait dengan memperhatikan kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan/atau skala yang perlu ditentukan," jelas Arifin.

Arifin juga menjelaskan mengenai berbagai opsi *Carbon Policy* dalam upaya transisi energi. Opsi pertama adalah skema *carbon tax* yaitu seluruh emisi yang dihasilkan dikenakan pajak. Sedangkan yang kedua adalah *cap and tax* yaitu hanya emiter yang memproduksi emisi melebihi cap tertentu yang dikenakan pajak. Namun dua opsi ini menurut Arifin tidak akan diberlakukan dalam waktu 3 tahun kedepan.

"Kemudian yang ketiga opsi *cap and trade* yaitu emiter yang memproduksi emisi melebihi cap diharuskan membeli dari emiter yang memproduksi emisi dibawah cap. Sedangkan bagi emiter yang memproduksi emisi melebihi cap namun tidak bisa trading keseluruhan kelebihan emisi, maka sisa emisi dikenakan *tax*," kata Arifin.

Opsi keempat menurut Arifin adalah *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang saat ini sedang disusun. Opsi ketiga dan keempat tersebut disebut Arifin dapat diterapkan terbatas dan bertahap untuk PLTU tanpa ada kerugian apapun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa Indonesia menuju *Net Zero Emission* 2060 merupakan upaya bersama membangun industri Energi Baru Terbarukan (EBT). Transisi EBT, disebut Zulkifli dibangun bukan hanya berdasar kebijakan namun juga memerlukan inovasi EBT dalam perkembangannya sehingga bisa menggantikan pembangkit fosil menjadi pembangkit EBT *baseload*.

"Kami sampaikan PLN juga telah melakukan beberapa simulasi biaya pajak karbon. Pada ujicoba, biaya pajak karbon adalah sebesar 153 M yang utamanya ditanggung oleh PLN sisanya oleh *Independent Power Producer* (IPP)," ungkap Zulkifli.

Arifin mengungkapkan total emisi sektor energi tahun 2020 mencapai 580 juta ton CO₂e. Pembangkit fosil mendominasi sebesar 279,3 juta ton CO₂e, kemudian transportasi sebesar 132,9 juta ton CO₂e, industri manufaktur sebesar 105,1 juta ton CO₂e, dari pengolahan batubara dan emisi fugitive 31,4 juta ton CO₂e, sektor kilang minyak sebesar 8,6 juta ton CO₂e, dan sektor komersial dan lainnya sebesar 29,4 juta ton CO₂e.

"Kami berharap dengan implementasi strategi menuju NZE kita dapat menekan emisi sektor energi menjadi tidak lebih dari 400 juta ton emisi pada tahun 2060" tutup Arifin. (U)



KEMENTERIAN ESDM

DORONG PENINGKATAN KOMPETENSI INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN



Direktur Teknik Dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara Forum Silaturahmi Nasional Inspektur Ketenagalistrikan (FORSILATNAS-IK) Kamis, 18 November 2021.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan, khususnya menghadapi tantangan ke depan. Fungsi pengawasan keteknikan yang diemban oleh Pemerintah dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan akan banyak dihadapkan pada hal baru terkait perkembangan teknologi dan kebijakan yang mungkin tidak pernah ditemui sebelumnya.

“Semoga jabatan Inspektur Ketenagalistrikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi tugas dan fungsi organisasi baik di instansi pemerintah pusat maupun di provinsi, khususnya dalam rangka mengawal pelaksanaan regulasi sektor ketenagalistrikan, dan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan yaitu berkaitan dengan penyediaan listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan,”

WANHAR

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik Dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara Forum Silaturahmi Nasional Inspektur Ketenagalistrikan (FORSILATNAS-IK) Kamis, 18 November 2021. Acara yang diselenggarakan secara daring ini bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi dan koordinasi seluruh anggota Inspektur Ketenagalistrikan baik yang bertugas di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat saling bertukar pengalaman dan pendapat yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme Inspektur Ketenagalistrikan.

Menurut Wanhar, pemerintah dan pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan dan menjaga pasokan listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan. Untuk itu pengawasan di lapangan sangat diperlukan melalui dukungan Inspektur Ketenagalistrikan yang berkompeten dan profesional.

“Penyediaan listrik tersebut diimplementasikan dalam ketentuan-ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dengan pengawasan keteknikan dalam berbagai hal di sektor ketenagalistrikan,” ucap Wanhar.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur ketenagalistrikan Yunan Nasikhin menyampaikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan fungsi pengawasan.

“Diperlukan juga sinergi antara Inspektur Ketenagalistrikan di Pemerintah Pusat dengan Inspektur Ketenagalistrikan di Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan menjadi lebih luas sesuai dengan lingkup kewenangannya,” ucap Yunan.

Dalam forum ini terdapat beberapa hal yang perlu didiskusikan khususnya terkait dengan penyelesaian dokumen-dokumen sebagai kelengkapan syarat pembentukan Organisasi Profesi Inspektur Ketenagalistrikan agar menjadi sebuah organisasi berbadan hukum di Kemenkumham dan berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

PEMBENTUKAN PERIKSA

Untuk mewujudkan Inspektur Ketenagalistrikan yang memiliki integritas, profesional, melayani dan mampu menjalankan peran dalam mengemban tugas dan fungsi, serta untuk membangun semangat kesejawatan profesi Inspektur Ketenagalistrikan sebagai perekat pemersatu dan untuk dharma bakti pada nusa dan bangsa, maka perlu dibentuk organisasi profesi yang menyatukan Inspektur Ketenagalistrikan di seluruh Indonesia yang disebut PERIKSA (Persatuan Inspektur Ketenagalistrikan Indonesia).

Organisasi Profesi Inspektur Ketenagalistrikan ini telah dikukuhkan pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 23.K/73/MEM/2020 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Pembentukan PERIKSA merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan. Kementerian ESDM bertugas memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang akan dilakukan oleh PERIKSA.

Wanhar kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan Forum Silaturahmi Nasional Inspektur Ketenagalistrikan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang konstruktif dalam rangka pembinaan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan serta penyiapan proses lebih lanjut terkait organisasi profesi Inspektur Ketenagalistrikan.

“Semoga jabatan Inspektur Ketenagalistrikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi tugas dan fungsi organisasi baik di instansi pemerintah pusat maupun di provinsi, khususnya dalam rangka mengawal pelaksanaan regulasi sektor ketenagalistrikan, dan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan yaitu berkaitan dengan penyediaan listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan,” tutup Wanhar. (AT)

VIDEO KREATIF UNTUK TINGKATKAN KUALITAS KOMUNIKASI PUBLIK

Video kreatif dipandang penting sebagai media yang positif dan modern dalam penyampaian pesan-pesan mengenai kebijakan Pemerintah, termasuk program-program di subsektor ketenagalistrikan. Melalui video kreatif, diharapkan publik lebih dapat memahami pesan yang disampaikan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Koordinasi Kehumasan Ditjen Ketenagalistrikan bertajuk *Temu Online Belajar* Penulisan Skrip untuk Video Kreatif, Kamis (18/11/2021). Ini merupakan kolaborasi antara Ditjen Ketenagalistrikan dan Ikatan Pranata Humas Pengurus Cabang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Iprahumas PC ESDM).

"Acara ini merupakan salah satu upaya Ditjen Ketenagalistrikan untuk mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik dan peningkatan kapasitas Pranata Humas yang mendukung tugas dan fungsi kami di Sekretariat Ditjen Ketenagalistrikan," ujar Munir. Selain itu, ia menambahkan, acara ini juga untuk mempererat kerja sama fungsional Pranata Humas dan penyelenggara/pelaksana kehumasan khususnya di Kementerian ESDM.

Munir lantas menyampaikan penyusunan konten media sosial khususnya video kreatif menjadi hal yang penting karena menjadi awal dalam pelaksanaan komunikasi publik. Sebagai regulator di subsektor ketenagalistrikan, Munir mengatakan Ditjen Ketenagalistrikan memiliki beberapa program komunikasi publik antara lain: sosialisasi regulasi dan kebijakan di bidang ketenagalistrikan melalui webinar, *coffee morning*, konferensi pers, pengelolaan media sosial, serta layanan informasi dan pengaduan publik terkait subsektor ketenagalistrikan.



Forum Koordinasi Kehumasan Ditjen Ketenagalistrikan bertajuk *Temu Online Belajar* Penulisan Skrip untuk Video Kreatif, Kamis (18/11/2021).

"Salah satu pesan kunci dalam komunikasi publik ini adalah kehadiran negara dalam penyediaan akses listrik yang cukup, andal, ramah lingkungan, dan dengan harga terjangkau," Munir mengungkapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Iprahumas PC KESDM Pandu Satria Jati menyambut baik kolaborasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan.

"Khusus mengenai *Temu Online Belajar*, kegiatan ini merupakan pelatihan singkat untuk menambah kemampuan teknis tentang kehumasan, sekaligus kredit bagi fungsional Pranata Humas. Kami mengajak Pranata Humas di seluruh Indonesia untuk belajar terkait hal-hal teknis. Kali ini kami mengajak belajar menulis skrip untuk konten video kreatif," kata Pandu.

Narasumber dalam acara ini adalah konten kreator Udd Sondakh dan *Chief of Information Officer* (CIO) Awrago Adieb Haryadi. Udd Sondakh menyebut kiatnya untuk ide konten kreatif. Menurutnya, ide bisa berasal dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, juga media termasuk TV, radio, YouTube, dan lainnya.

"Sebelum memulai membuat video, dicari dulu ide dasarnya. Setiap manusia bisa menciptakan ide, cari isu-isu yang paling relate dengan kita. Kita bisa mencari ide melalui media seperti YouTube tapi jangan dijiplak mentah-mentah. Kita bisa lakukan prinsip ATM, yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi," Udd menjelaskan.

Dalam membuat video, Adieb Haryadi mengibaratkan storyboard seperti peta yang diperlukan saat hendak bepergian. Storyboard bisa dianggap sebagai panduan dalam pembuatan video.

"Untuk membuat *storyboard*, buat saja dulu. Awalnya jelek gak apa, yang penting dimengerti oleh Tim Produksi. Latihan saja dulu, tidak perlu terkekang dengan keterbatasan teknologi. Kalau butuh inspirasi, jangan ragu untuk lihat internet untuk menambah wawasan kita," ujarnya menyemangati peserta.

Adieb memberikan praktek untuk membuat *storyboard* yang menarik untuk pembuatan video kreatif. Tak hanya Pranata Humas, peserta acara ini berasal dari berbagai latar profesi dari berbagai kementerian/ lembaga, juga mahasiswa. (AMH)

PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN PERLU SINERGI DUNIA PENDIDIKAN

Pemerintah terus mendorong berbagai usaha dalam mencapai tujuan pembangunan ketenagalistrikan nasional yaitu penyediaan listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi antar seluruh pihak, diantaranya sinergi dalam dunia pendidikan dalam membentuk tenaga kerja yang handal dan kompeten di bidang ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam acara *Light-Up Summit "The Future Is Electric: Who Will Lead The Dance?"* di Jakarta, Sabtu (30/01).

"Dalam meningkatkan kualitas SDM diperlukan adanya sinergi antara dunia pendidikan, dunia kerja, masyarakat umum, serta dunia profesi," ujar Tutuka.

Sejumlah inovasi teknologi yang diterapkan dalam bidang ketenagalistrikan menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang handal dan kompeten dari hulu hingga hilir industri ketenagalistrikan. Kebutuhan tersebut disebut Tutuka dapat dipenuhi dengan link and match antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri ketenagalistrikan. Lebih lanjut Tutuka menjelaskan bahwa standar kompetensi tenaga kerja bidang ketenagalistrikan harus melalui uji kompetensi dan kemudian mendapat sertifikat kompetensi agar mendapat pengakuan kompetensinya.

"Tujuannya adalah menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan ketersediaan tenaga yang andal aman serta ramah lingkungan, mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, mewujudkan tertib penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, dan mewujudkan peningkatan tenaga teknik ketenagalistrikan untuk menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing," ungkap Tutuka.

Lebih lanjut, Tutuka menjelaskan mengenai pentingnya link and match diterapkan dalam kurikulum. Disampaikannya, bahwa hal ini bermanfaat bagi semua pihak. Bagi pelaku usaha ketenagalistrikan ini bermanfaat agar ketersediaan lulusan perguruan tinggi yang siap bekerja di bidang ketenagalistrikan, meningkatkan mutu penerimaan calon pegawai siap pakai sesuai dengan kebutuhan jenjang, mengurangi biaya diklat dalam menyiapkan calon pegawai, mempercepat proses penerimaan calon pegawai. Dan manfaat bagi masyarakat adalah meningkatkan kompetensi pendidik (dosen) dan peserta didik, juga lulusan perguruan tinggi yang kompeten, memiliki daya saing, berkualitas, dan profesional.

"Harapannya kita bisa semakin meningkatkan sinergi antara dunia pendidikan dan industri dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang handal dan kompeten yang ada di sektor ketenagalistrikan yang semakin dinamis," tutup Tutuka.

Dalam kesempatan yang sama GM Unit Induk Pusat Pengatur Beban PT PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa

transisi energi menuju *Zero Carbon 2060* memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

"Kemampuan bangsa dalam membangun industri Energi Baru Terbarukan (EBT) nantinya memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan juga investasi yang besar. Ditambah dengan target pengurangan impor BBM dan LNG sangat memerlukan dukungan masyarakat agar program electric vehicle (EV) dan kompor induksi berjalan sesuai target," ungkap Edwin.

Direktur Operasi PT Pertamina *Geothermal Energy* (PGE) Eko Agung Bramantyo yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa dalam pembangunan ketenagalistrikan di masa depan, EBT akan mengambil peran yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu porsi pembangkit EBT 23% pada tahun 2025 dan terus berlanjut hingga mencapai target *Zero Carbon* pada 2060.

Tentang *Light-Up Summit*

Light-Up Summit merupakan acara *Energy Academy* Indonesia (Ecadin) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional 2021. Ecadin dan Ditjen Gatrik membuat program untuk mendorong penguasaan pengetahuan dan teknologi di *sector energy* dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui *bootcamp* yang akan diselenggarakan mulai Senin (1/11/2021).

Beasiswa *Bootcamp* dan Internship dengan tajuk *Light Up* Membangun Bangsa Berbasis Pengetahuan diselenggarakan berupa *join research* dimana 100 peserta terpilih dapat mengikuti bootcamp dan internship bersama kalangan profesional akademisi dan peneliti.

Founder Ecadin Desti Alkano menyampaikan bahwa acara ini merupakan upaya Ecadin dalam mendorong peningkatan literasi kapasitas dan kompetensi generasi muda di sektor ketenagalistrikan dalam menyongsong era baru yaitu era desentralisasi, dekarbonisasi, dan digitalisasi. Selain pengumuman 100 peserta *bootcamp* terpilih, juga diumumkan dua puluh karya terpilih *Photo & Reels Sharing* "Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik" untuk memeriahkan Hari Listrik Nasional 2021. (U)



Pembangunan PLTA Asahan 3 dengan kapasitas terpasang sebesar 184MW akan meningkatkan bauran energi pembangkit EBT sebesar 3,3%.



PROYEK PLTA ASAHAN 3 DIHARAP TINGKATKAN BAURAN PEMBANGKIT EBT

Pembangunan PLTA Asahan 3 yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2024 dinilai dapat meningkatkan bauran energi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Sumatera Utara. Untuk itu diperlukan sinergitas BUMN antara PT PLN (Persero) dan PT Inalum agar pembangunan proyek PLTA Asahan 3 dapat selesai sesuai target.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTA Sigurgura PT Inalum (Persero), PLTA Asahan PT PLN (Persero) dan PLTA Asahan 2 PT BDSN di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (16/11/2021).

"Pembangunan PLTA Asahan 3 dengan kapasitas terpasang sebesar 184MW akan

meningkatkan bauran energi pembangkit EBT sebesar 3,3%," jelas Rida.

Beroperasinya PLTA Asahan 3 akan meningkatkan *reserve margin* di Sumatera Utara sebesar 4,58% sehingga akan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Sumatera Utara dan mengejar target RUPTL untuk pemenuhan *reserve margin* sebesar 35-40%.

Lebih lanjut, beroperasinya PLTA Asahan 3 akan menurunkan biaya produksi listrik PLN di Sumatera Utara yang semula sebesar Rp.1.593/kWh menjadi Rp.1.521/kWh. Hal ini berpotensi meringankan beban PLN secara korporat dalam biaya penyediaan listrik dengan penghematan sebesar 1,9 Triliun per tahun.

"Hal ini penting karena ujung-ujungnya ke subsidi. Apabila BPP turun, maka APBN

akan turun," ungkap Rida.

Pemerintah mengungkapkan Indonesia saat ini sedang memasuki fase transisi energi sehingga strategi mengurangi penggunaan energi fosil pada seluruh sektor energi sangat penting dilakukan.

Rida menjelaskan pada COP26 di Glasgow, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi *Net Zero Emission* dunia.

Pemerintah bersama PT PLN telah meluncurkan RUPTL 2021-2030, dengan rencana penambahan pembangkit listrik 40,6GW sampai dengan tahun 2030.

"Ini menjadikan RUPTL ini sebagai RUPTL hijau sebagai dasar mencapai *Zero Carbon 2060*," ungkap Rida.

Perlunya Sinergitas BUMN

Rombongan Komisi VII DPR RI yang diwakili oleh Ketua Tim Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah mengetahui rencana peningkatan kapasitas produksi, serta sebagai pelaksanaan pengawasan PLTA Sigurgura PT Inalum, PLTA Asahan 3 PT PLN dan PLTA Asahan 1 PT BDSN. Pihaknya memastikan adanya sinergitas BUMN agar proyek ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

"Kehadiran DPR ingin memastikan sinergitas antara BUMN yang lagi-lagi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Sugeng.

Ketua Komisi VII DPR RI ini menjelaskan perlunya sinergitas BUMN antara PLN dan Inalum untuk kepentingan rakyat.

"Perlu dirumuskan skema kerjasama *win win solution* dan *sustainable*," ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, dalam *Green RUPTL* yang telah disahkan, salah satu pembangkit EBT yang akan dikembangkan adalah PLTA, dengan total tambahan kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2030 adalah 10,4GW termasuk *pumped storage*.

Direktur Operasi dan Portofolio PT Inalum (Persero) Danny Praditya dalam kesempatan tersebut menjelaskan PT Inalum saat ini sedang meningkatkan kapasitas produksi aluminium dari 300 ktpa menjadi 500 ktpa. Dengan adanya kenaikan kapasitas tersebut, dibutuhkan pasokan listrik yang *sustainable* dan terjangkau. Salah satunya adalah dengan melakukan akuisisi PLTA Asahan 1 PT BDSN dan PLTA Asahan 3 PT PLN.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas support dan perhatian yang sudah diberikan DPR RI, Komisi VII, Pemerintah dan PLN. Mudah-mudahan dengan sinergitas yang sudah terjalin dan dukungan dari regulator (pemerintah) bisa segera direalisasikan," ucap Danny.

Rida mengungkapkan, pemerintah mengapresiasi atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara PT PLN dan PT Inalum selama ini. Ia berharap agar kerjasama tersebut dapat terus diteruskan untuk sinergitas BUMN.

"Saya pikir apabila diteruskan, ujungnya akan memperkuat core business masing-masing," ujar Rida.

Kunjungan kerja ini dihadiri pula Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan EBTKE Chrisnawan Aditya, Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) Muhammad Iqbal Nur, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (AT)



Pembangunan PLTA Asahan 3 dengan kapasitas terpasang sebesar 184MW akan meningkatkan bauran energi pembangkit EBT sebesar 3,3%,"

Rida Mulyana

DITJEN GATRIK

DORONG KONVERSI KOMPOR INDUKSI



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong penggunaan kompor induksi sebagai salah satu upaya dalam penggunaan energi bersih. Salah satu upaya mendorong hal tersebut adalah dengan program konversi Kompor LPG ke kompor induksi yang memiliki manfaat untuk pemerintah, masyarakat, dan PLN. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad saat memberikan kuliah umum pada program *Bootcamp* dan *Internship* bertajuk "LIGHT-UP! Membangun Bangsa Berbasis Pengetahuan," Senin (1/11/2021).

Munir mengatakan, selain mempercepat ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) < program strategis lain dalam meningkatkan konsumsi listrik adalah dengan mendorong untuk pemanfaatan kompor induksi di masyarakat. Ia mengatakan, target pengguna kompor induksi berdasarkan *Grand Strategi Energi Nasional* (GSEN) di tahun 2030 sebesar 19 juta pengguna dengan rincian 1 juta pengguna di tahun 2021 dan 2 juta pengguna setiap tahunnya mulai tahun 2022.

"Target ini difokuskan kepada rumah tangga PLN bersubsidi pada lokasi diluar Jargas dan DME (*dimethyl ether*)," ucap Munir.

Konversi kompor LPG ke kompor induksi disebut Munir merupakan bentuk upaya bangsa Indonesia menuju kemandirian energi ditengah tingginya impor LPG yang mencapai ±Rp.50,6 Triliun/Tahun. Lebih lanjut Munir mengungkapkan penggunaan kompor induksi listrik bagi pemerintah dapat menghemat devisa negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja dalam negeri.

"Bagi Masyarakat, konversi ke kompor induksi mengurangi beban biaya memasak hingga 57% bagi Rumah tangga Bersubsidi PLN," jelas Munir.

Bagi PLN, konversi kompor induksi ini untuk optimalisasi pemanfaatan *reserve margin* PLN diwaktu memasak pagi dan sore hari (05.00-17.00), dimana hal ini setara 3,2 GW dengan potensi pendapatan Rp 1,8 T/tahun.

Munir mengatakan bahwa PLN telah melakukan kajian terhadap dampak dari konversi 19 juta pengguna kompor LPG ke kompor induksi rumah tangga subsidi di lokasi yang tidak dilalui jaringan gas dan DME. Berdasarkan kajian tersebut, pada tahun 2030, ketika pengguna kompor induksi mencapai 19jt pengguna, maka akan meningkatkan belanja lokal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,5 %. Pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk mendorong program konversi kompor induksi listrik sebesar Rp. 2,85 triliun untuk 2 juta pengguna.

"Anggaran pemberian gratis kompor induksi beserta utensilnya sebesar Rp. 2,4 triliun dan pemberian subsidi atas tambahan pemakaian listrik kompor induksi sebesar Rp. 456 Milyar," tutup Munir. (AT)

MOMENTUM PENINGKATAN SDM KETENAGALISTRIKAN DI HARI LISTRIK NASIONAL 2021

Dalam rangka memeriahkan Hari Listrik Nasional tahun 2021, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama *Energy Academy Indonesia* (Ecadin) menyelenggarakan *Bootcamp* dan *Internship* bertajuk "LIGHT-UP! Membangun Bangsa Berbasis Pengetahuan". Dalam penyelenggaraan *bootcamp* hari pertama, Senin (1/11/2021), Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan baik dari sisi hulu hingga hilir industri ketenagalistrikan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan meningkatkan *link and match* antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri ketenagalistrikan.

Menurut Munir, perkembangan teknologi yang semakin cepat saat ini, suka tidak suka akan mempengaruhi pengembangan subsektor ketenagalistrikan, baik dari sisi bisnis penyediaan tenaga listrik maupun kebutuhan *human resources* – nya.

"Semua pihak sesuai dengan perannya masing-masing harus menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai macam perubahan dan tantangan yang ada," ucap Munir.

Dengan adanya kegiatan seperti *bootcamp* dan *internship* seperti ini diharapkan dapat mempersiapkan dan menciptakan *human resources* Indonesia yang unggul dalam menghadapi persaingan global

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ECADIN selaku penyelenggara dari kegiatan ini karena kegiatan ini menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan kompetensi terkait subsektor ketenagalistrikan," ungkap Munir.

Pada pertemuan pertama *Bootcamp*, Munir menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun strategi jangka panjang sektor energi untuk mencapai *net zero emission* (NZE) di tahun 2060 dengan melakukan penurunan penggunaan bahan bakar fosil, pemanfaatan peralatan yang lebih ramah

lingkungan, dan peningkatan efisiensi sangat didorong untuk mencapai target di tahun 2060 ini.

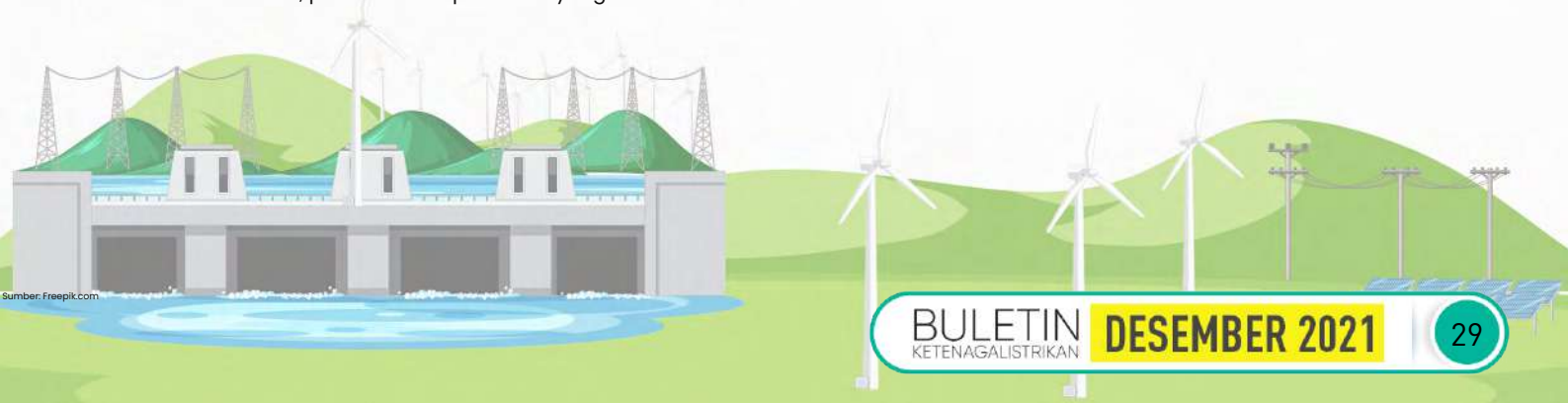
Net-Zero Emission merupakan salah satu upaya yang diterapkan guna mengatasi masalah emisi karbon ini. *Net Zero Emission* bukan berarti tidak ada emisi karbon sama sekali, akan tetapi karbon yang dikeluarkan sama dengan karbon yang diserap.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi menuju NZE adalah menyediakan listrik dari sumber energi karbon rendah yang berdampak pada keharusan mengurangi dominasi fosil terutama batubara pada sektor pembangkitan. Sementara penggunaan batubara di pembangkit saat ini cukup besar dan relatif murah.

"Industri juga dituntut untuk menggunakan energi yang rendah karbon agar dapat diserap oleh pasar global," Munir menjelaskan.

Founder Ecadin Desti Alkano menjelaskan bahwa acara ini merupakan upaya Ecadin dalam mendorong peningkatan literasi kapasitas dan kompetensi generasi muda di sektor energi khususnya ketenagalistrikan dalam menyongsong era baru yaitu era desentralisasi, dekarbonisasi, dan digitalisasi dalam menjawab tantangan *supply demand link and matching* yang semakin dinamis dan menantang pada skala nasional.

Beasiswa *Bootcamp* dan *Internship* yang bertajuk "LIGHT-UP! Membangun Bangsa Berbasis Pengetahuan" diselenggarakan berupa *joint research* yang diikuti oleh 100 peserta terpilih dari total 1044 pendaftar dari 265 institusi pendidikan dan 64 institusi pemerintahan dan swasta. *Bootcamp* dibagi menjadi tiga topik yaitu *Power System Planning & Economic, Electrification of Transportation, serta Design & Analysis of Smart (Micro) Grid*. (AT)



DORONG KEMUDAHAN DAN KEPASTIAN USAHA KELISTRIKAN, KESDM LAKUKAN ANALISIS TINGKAT RISIKO JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus berupaya untuk mendorong peningkatan investasi di sektor ketenagalistrikan dengan mempercepat dan mempermudah perizinan usaha ketenagalistrikan. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu penerapan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Setiap Kementerian/Lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usahanya, yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha dan menciptakan kepastian usaha," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada Webinar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Jakarta, Kamis (28/10).

Lebih lanjut Munir menjelaskan bahwa aturan tersebut sebagai tindak lanjut dari penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan regulasi ini, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis

risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha, termasuk di sektor kelistrikan.

"Dengan berlakunya regulasi ini, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dengan pendekatan berbasis risiko" tutur Munir.

Usaha ketenagalistrikan disebut Munir dibagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam tindak lanjut UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, usaha jasa penunjang tenaga listrik telah diperluas cakupannya untuk dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, badan layanan umum, dan koperasi.

Guna mempermudah Badan Usaha dalam mengajukan perizinan di sektor ketenagalistrikan, seluruh perizinan berusaha di sektor ketenagalistrikan dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta pemenuhan standar persyaratan pada Aplikasi Perizinan ESDM.

Dalam sistem tersebut, sesuai dengan kewenangannya Ditjen ketenagalistrikan melakukan verifikasi persyaratan teknis sebagai dasar untuk penerbitan Perizinan Berusaha. Karena sifatnya yang sudah daring, badan usaha dapat melakukan tracking status permohonan perizinan dan akan memperoleh notifikasi hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi atau diperbaiki apabila badan usaha mendapatkan notifikasi penolakan.

"Semuanya dilakukan agar pelaku usaha tidak mengalami kendala yang berarti dalam pengajuan perizinan berusaha di sektor ketenagalistrikan," kata Munir.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan bahwa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 ini, badan usaha atau perseorangan asing diperbolehkan menjalankan usaha jasa penunjang tenaga listrik dengan membentuk kantor perwakilan asing. "Kantor perwakilan asing diperbolehkan, namun ada pembatasan. Mereka hanya bisa berusaha pada tiga jenis usaha, yaitu pembangunan dan pemasangan, konsultasi, dan pemeliharaan" ujar Wanhar.

Wanhar juga menambahkan bahwa kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi dan wajib membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha dalam negeri. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 25 Tahun 2021, permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing akan dikenai biaya administrasi sebagai penerimaan negara bukan pajak. (U/RAF)

ERA PERSAINGAN GLOBAL, TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN HARUS PENUHI STANDARDISASI KOMPETENSI

Era Persaingan Global, Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Harus Penuhi Standardisasi Kompetensi Sejalan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan dalam menciptakan iklim investasi serta kemudahan dalam berusaha, pemerintah merasa perlu mengatur kesiapan tenaga teknik yang kompeten guna mendukung tercapainya pembangunan nasional. Standardisasi kompetensi diperlukan agar tenaga teknik dari dalam negeri mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam Webinar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Jakarta, Kamis (28/10) menyampaikan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik wajib menggunakan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha.

Lebih lanjut, Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tri Handoko mengungkapkan, untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi dan sebagai langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan.

"Bukti formal kemampuan atau kompetensi tenaga teknik adalah sertifikasi kompetensi, dan dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan," ucap Tri.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencapai ketenagalistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan serta terciptanya harmonisasi pemenuhan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan mendorong kemampuan, kompetensi, dan integritas tenaga kerja lokal yang mampu berdaya saing baik di dalam maupun luar negeri.

Lebih lanjut Tri menjelaskan standardisasi kompetensi bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemangku kepentingan ketenagalistrikan untuk kegiatan sertifikasi kompetensi, perumusan rancangan standar latih kompetensi, perumusan kebijakan keteknikan bidang ketenagalistrikan, menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan, meningkatkan kompetensi tenaga teknik, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan di bidang ketenagalistrikan, mewujudkan konsistensi dan mampu telusur penerapan SKTTK, dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif tenaga teknik.

"Dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 6 tahun 2021 diharapkan kemudahan berusaha pada sektor ketenagalistrikan dapat terpenuhi dengan tetap mengutamakan keselamatan ketenagalistrikan untuk mencapai tujuan ketenagalistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Serta terciptanya harmonisasi pemenuhan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan mendorong kemampuan, kompetensi, dan integritas tenaga kerja lokal yang mampu berdaya saing baik di dalam maupun luar negeri," tutup Tri. (U/KO)



Sumber: Freepik.com

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar memberikan paparan pada Webinar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Jakarta, Kamis (28/10).

AKSELERASI IMPLEMENTASI KBLBB BUTUH KOLABORASI DAN INOVASI

Pemerintah terus mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai transportasi jalan. PT. PLN (Persero) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi lokomotif bagi perkembangan implementasi KBLBB diharapkan terus melakukan kolaborasi dan inovasi untuk mengimplementasikan KBLBB tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara *Launching Web Partnership SPKLU dan Home Charging Services* di Jakarta, Selasa (26/10).

"PLN harus terus berkolaborasi dan berinovasi dengan berbagai *stakeholder* agar terjadi akselerasi implementasi KBLBB," ungkap Ida.

Menurut Ida, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan dan Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk KBLBB, yang menjadi momentum hadirnya sinergi seluruh komponen bangsa untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Ida menyampaikan bahwa pemerintah mengapresiasi PLN dan pihak-pihak lain terkait atas segala upaya dan komitmennya dalam mendukung terbentuknya ekosistem KBLBB. Hingga September 2021 telah tersedia infrastruktur *EV Charging Station* sebanyak 187 unit *EV Charger*. Dan saat ini sedang proses

pembangunan penyediaan SPKLU tambahan sebanyak 67 unit SPKLU.

Pemerintah juga mengapresiasi atas kesiapan sistem pendukung (*Charge.IN*), serta produk-produk layanan yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi berbagai pihak dalam mempercepat implementasi ekosistem KBLBB.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril menyampaikan bahwa PLN berkomitmen penuh dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB serta PLN mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mempercepat ekosistem KBLBB di Indonesia.

"Untuk memudahkan pelayanan, PLN menghadirkan dua produk terbaru yaitu *Website Partnership SPKLU* yang membuka peluang Badan Usaha untuk dapat berkolaborasi menjadi *partner* penyediaan SPKLU berbasis *sharing economic model*. Selain itu PLN juga menyediakan *Home Charging Services*," ungkap Bob.

Lebih lanjut Bob menjelaskan bahwa pada portal *Website Partnership SPKLU*, masyarakat dapat mengetahui skema kerjasama, alur kerja, dan juga dapat melakukan pendaftaran sebagai *partner*.

Sedangkan *Home Charging Services* merupakan layanan satu pintu bagi pelanggan yang membeli KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerjasama dengan PLN, dimana pelanggan akan mendapatkan diskon layanan tambah daya dan juga pemasangannya sehingga pemilik KBLBB tidak kesulitan dalam mengisi daya kendaraannya. Keuntungan lainnya adalah konsumen akan mendapatkan diskon khusus saat mengisi daya kendaraan pada jam 22.00-05.00 sebesar 30%.

Ida menyampaikan dengan di-*launching*-nya kedua layanan ini, Pemerintah berharap bagi seluruh *stakeholder* untuk bersama-sama berkolaborasi mendorong percepatan penggunaan KBLBB dan turut mengambil peran dalam transformasi transportasi ramah lingkungan ke kendaraan listrik.

"Semoga dengan kehadiran inovasi produk dari PLN dapat mengakselerasi pengembangan ekosistem KBLBB di Indonesia, serta memberikan kemudahan-kemudahan layanan dan fasilitas bagi masyarakat," tutup Ida. (U)



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara *Launching Web Partnership SPKLU dan Home Charging Services* di Jakarta, Selasa (26/10).

TINGKATKAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN, DITJEN GATRIK GELAR RAPAT KONSENSUS TEKNIS SISTEM KETENAGALISTRIKAN (KT 29-01)

Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berupaya menyediakan energi listrik bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek keselamatan ketenagalistrikan dimana setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu upaya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mengawal aspek keselamatan ketenagalistrikan adalah dengan menyelenggarakan Rapat Konsensus Komite Teknis Sistem Ketenagalistrikan (KT 29-01) bersama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Rabu, (06/10) di Jakarta.

Rapat Konsensus yang dipimpin oleh Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan Wahyudi Joko Santoso ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan semua pihak pemangku kepentingan terhadap Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang telah disusun sebelumnya. Rapat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan standardisasi ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan.

“Saran dan usul dari masyarakat standardisasi ketenagalistrikan sangat dibutuhkan demi kesempurnaan standar dan juga revisi standar dikemudian hari,” ujar Wahyudi.

Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan disebut Wahyudi salah satunya meliputi pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada setiap instalasi penyediaan tenaga listrik serta setiap instalasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sesuai dengan SNI di bidang ketenagalistrikan. Dalam hal belum terdapat SNI, Instalasi penyediaan tenaga listrik serta peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat menggunakan standar internasional atau standar lain yang diberlakukan.

Sebagai informasi, pada tahun 2021 terdapat 8 (Delapan) Komite Teknis yang terdiri dari:

- Komite Teknis Kaki Lampu, Fiting Lampu dan Luminer
- Komite Teknis Turbin Listrik
- Komite Teknis Sistem Ketenagalistrikan
- Komite Teknis Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik
- Komite Teknis Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik



Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan Wahyudi Joko Santoso memimpin Rapat Konsensus Komite Teknis Sistem Ketenagalistrikan (KT 29-01) bersama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Rabu, (06/10) di Jakarta.

- Komite Teknis Transformator
- Komite Teknis Peralatan Listrik
- Komite Teknis Persyaratan Umum Instalasi Listrik

Hasil RSNI yang telah dirumuskan menghasilkan 16 RSNI dari target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebanyak 16 RSNI. Saat ini terdapat 4 judul RSNI yang sedang dalam proses konsensus, yakni Komite Teknis Sistem Ketenagalistrikan, 2 judul RSNI; Komite Teknis Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, 1 judul RSNI; dan Komite Teknis Peralatan Listrik, 1 judul RSNI.

Untuk Rencana Perumusan RSNI Tahun 2022 terdapat 5 (Lima) Komite Teknis yang terdiri dari Komite Teknis Turbin Listrik, Komite Teknis Sistem Ketenagalistrikan, Komite Teknis Peralatan dan Sistem Proteksi Listrik, Komite Teknis Transformator, dan Komite Teknis Peralatan Listrik.

Pada tahun 2022 mendatang, rencana kegiatannya memprioritaskan pada kegiatan perumusan RSNI terkait Program Nasional diantaranya: Pengembangan Standar Terkait Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Program untuk mendukung peningkatan efisiensi pembangkit, Pengembangan Standar untuk *Smart Grid* dan VRE (*Variabel Renewable Energy*), Pengembangan Standar Untuk mendukung program *Rooftop*, dan Pengembangan Standar PUIL mendukung program APDAL.

Hasil Rapat Konsensus Komite Teknis Sistem Ketenagalistrikan pada Tahun 2021 ini diantaranya adalah RSNI Koneksi Sumber Energi Terdistribusi dengan *Grid* yang mengacu pada IEC TS 62786:2017 dan juga RSNI Assessment Mutu Daya – Karakteristik Kelistrikan yang Disuplai oleh Jaringan Publik yang mengacu pada IEC TS 62749:2020. (U)

PEMERINTAH DORONG PENGGUNAAN SMART GRID UNTUK TINGKATKAN PENETRASI EBT

Untuk mendukung penetrasi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi, pemerintah mendorong penggunaan smart grid. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan *smart grid* menjadikan sistem pengaturan tenaga listrik lebih efisien dan menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi.

"*Smart grid* juga mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik," ujar Rida dalam pembukaan PJB Connect secara daring, Jumat (22/10/2021).

Ia menyebut berdasarkan laporan yang diterima, salah satu *on going project* dari PT PJB yang berkaitan dengan implementasi *smart grid* di Indonesia adalah *Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic, and Optimization Center* (REMDOC). Rida mengatakan *project* tersebut sudah memasuki *stage II*. Pada Juli 2020, sebanyak 14 dari 28 pembangkit sudah terintegrasi.

"Besar harapan kami kepada para pelaku usaha ketenagalistrikan untuk terus berkomitmen dalam pengembangan smart grid yang menjadi salah satu kunci sukses transisi pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan," kata Rida.

Rida mengungkapkan arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi dari energi fosil menjadi EBT sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan *Nationally Determined Contributions* (NDC) pada 2030 sebesar 29% dari *Business as Usual* (BaU) dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan Bantuan Internasional.

"Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan *roadmap* menuju *Net Zero Emission* (NZE). Pemerintah sudah mengarah ke sana," tutur Rida.

Ia lantas menyampaikan tantangan yang harus dihadapi menuju NZE di antaranya adalah mengurangi emisi yang ada saat ini khususnya pada sektor pembangkitan. Sementara penggunaan batubara di pembangkit saat ini cukup besar dan relatif murah. Selain itu, industri juga dituntut untuk menggunakan energi yang rendah karbon agar dapat diserap oleh pasar global.

"Pengembangan kelistrikan ke depan terutama di sisi pembangkitan mengarah kepada teknologi dan sumber daya yang ramah lingkungan, seiring dengan upaya PLN selaku BUMN subsektor ketenagalistrikan dan Pemerintah untuk bertransisi ke *Net Zero Emission*," ujarnya.

Senada, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menyampaikan bahwa sejak 2015 sudah ada komitmen dari dunia internasional untuk mengurangi emisi karbon dan rencananya sampai 2050 sudah mencapai NZE.

"Dari sisi bisnis dan investasi, pelaku usaha merespon lebih agresif atas emisi karbon. Beberapa dari mereka justru punya target 2040 sudah *zero carbon*," ujar Nurul Ichwan. Ia menyampaikan Uni Eropa bahkan sudah mengajukan aturan mengenai *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM). Regulasi ini menetapkan bahwa pada 2023 semua barang ekspor yang masuk ke Uni Eropa akan dicatat kontribusi karbon dalam proses produksinya.

PJB Connect adalah gelaran tahunan yang diselenggarakan oleh PT PJB untuk merayakan ulang tahunnya sekaligus memeriahkan Hari Listrik Nasional. Acara ini bertujuan untuk menghubungkan stakeholder ketenagalistrikan seluruh dunia serta meningkatkan performa ketenagalistrikan Indonesia. Tahun ini, PJB Connect mengambil tema "*Go to Market*" yang dilaksanakan pada 22-29 Oktober 2021 berupa *e-conference* dan *virtual exhibiton*. (AMH)

DUKUNG PEMANGKASAN EMISI KARBON, KESDM INISIASI SISTEM *CAP AND TRADE CARBON*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi sistem *cap and trade carbon* melalui uji coba jual beli karbon di subsektor ketenagalistrikan, khususnya di lingkungan PLTU yang sifatnya masih *voluntary* pada Maret–Agustus 2021 lalu. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan hal tersebut dalam acara *launching PT Energy Management Indonesia (Persero)* ke dalam PLN Group, Jumat (22/10/2021), secara virtual.

“Langkah ini bertujuan untuk mendukung target pemangkasan emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) di sektor energi sebesar 314–398 juta ton pada 2030,” ujar Rida. Ia menambahkan uji coba perdagangan karbon ini menerapkan mekanisme *cap, trade*, dan *offset* sehingga diperlukan pembatasan terhadap nilai emisi karbon yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik batubara. Ia lantas menjelaskan bahwa entitas yang mengemisi lebih dari *cap* diharuskan membeli ijin emisi dari entitas yang mengemisi di bawah *cap* atau membeli sertifikat penurunan emisi.

“Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli ijin emisi atau sertifikat penurunan atas emisi di atas *cap* seluruhnya, maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon,” tambahnya. Pengembangan kelistrikan ke depan terutama di sisi pembangkitan akan makin bergeser ke penggunaan sumber daya dan teknologi yang ramah lingkungan seiring dengan upaya PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk bertransisi ke *net zero emission*.

Rida mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk penurunan emisi GRK dan mendukung tercapainya bauran energi baru terbarukan (EBT) dan. Di antaranya adalah pelaksanaan *co-firing* biomassa di PLTU PLN, konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, serta menjalankan konservasi dan efisiensi energi.

“Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025, dilakukan *co-firing* biomassa di beberapa PLTU PLN dengan porsi rata-rata 10% untuk PLTU Jawa–Bali dan 20% untuk PLTU luar Jawa–Bali, dengan *capacity factor* (CF) 70%. Total kapasitas setara 2.700 MW dan membutuhkan 8–13 juta ton biomassa/tahun,” ia menjelaskan.

Sementara itu, program dedieselisasi dilakukan pada 588 MW PLTD yang setara dengan 1.2 GWp pembangkit listrik tenaga



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam acara *launching PT Energy Management Indonesia (Persero)* ke dalam PLN Group, Jumat (22/10/2021).

surya (PLTS), yang di antaranya dilengkapi dengan baterai. Upaya lainnya adalah membangun 4,7 GW PLTS dan 0,6 GW pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) untuk mencapai bauran EBT 23% yang semuanya diharapkan selesai pada tahun 2025.

“Besar harapan kami kepada PT *Energy Management Indonesia (Persero)* untuk terus berkomitmen untuk berkontribusi pada proses transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal,” kata Rida.

Senada, dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan bergabungnya PT *Energy Management Indonesia (Persero)* ke PLN dapat mendukung Pemerintah untuk menuju nol emisi karbon atau *Net Zero Emission* (NZE) selambat-lambatnya tahun 2060. EMI adalah perusahaan yang fokus pada usaha efisiensi energi, konservasi energi, energi baru terbarukan serta konservasi sumber daya alam.

“Bergabungnya EMI sebagai anak usaha PLN bertujuan mendukung inisiatif dekarbonisasi menuju *green economy Indonesia*,” ujar Zulkifli.

Pengalihan saham EMI ke PLN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT PLN. Penggabungan ini juga didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 9 September 2021 terkait perubahan anggaran dasar EMI dalam rangka bergabung dengan PLN. (AMH)

SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO PERMUDAH PENGAJUAN PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN



TIDAK PERLU PERANTARA/CALO

TIDAK ADA KOMISI/GRATIFIKASI

MENGETAHUI INDIKASI PELANGGARAN DI DJEN GATRIK?

LAPORKAN
DI: [WBS.ESDM.GO.ID](https://wbs.esdm.go.id)



gatrik.esdm.go.id / [f](#) [@](#) [@infogatrik](#) / [v](#) Info Gatrik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mempermudah perizinan di sektor ketenagalistrikan dengan memanfaatkan sistem daring. Seluruh perizinan berusaha di sektor ketenagalistrikan telah dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan hal tersebut dalam Webinar Kemudahan Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik, Kamis (21/10/2021).

"Dalam sistem tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan melakukan verifikasi persyaratan teknis sebagai dasar untuk penerbitan Perizinan Berusaha. Karena sifatnya yang sudah daring, badan usaha dapat melakukan tracking status permohonan perizinan," ujarnya.

Selain itu, Rida menambahkan, badan usaha juga memperoleh notifikasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi atau diperbaiki apabila badan usaha mendapatkan notifikasi penolakan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Selain bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, UUCK juga memberikan kemudahan usaha. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan UUCK tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menggunakan pola yang sama, yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha.

"Setiap kementerian/lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko rendah, menengah, atau tinggi sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha, serta dapat menciptakan kepastian usaha yang selama ini dituntut oleh investor," kata Rida.

Ia menyampaikan dalam regulasi tersebut diatur juga mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha.

KBLI dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa. Untuk sektor ketenagalistrikan, KBLI yang digunakan adalah 35111 sampai dengan 35118 yang mencakup usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari selaku

narasumber menjelaskan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengajuan izin usaha ketenagalistrikan.

"Untuk kegiatan usaha risiko rendah hanya diwajibkan Nomor Induk Berusaha (NIB), usaha risiko menengah diwajibkan NIB dan Sertifikat Standar, serta risiko tinggi diwajibkan NIB dan Izin atau Sertifikat Standar jika diperlukan. Mayoritas untuk penyediaan tenaga listrik merupakan risiko tinggi, sehingga membutuhkan izin," tutur Ida.

Ia lantas menyampaikan skema perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik yang saat ini diberlakukan, di antaranya adalah Penetapan Wilayah Usaha sebagai dasar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), dan Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS).

"Yang perlu digarisbawahi adalah banyaknya ragam perizinan berusaha yang ada saat bukan berarti seluruh macam perizinan harus dimiliki sebelum melakukan kegiatan usaha, namun pada prinsipnya adalah menyesuaikan dengan kegiatan usaha yang dilakukan," Ida menyampaikan.

Narasumber juga dihadirkan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Ariesta Riendrias Puspasari dan Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Edy Junaedi. Selain itu, ada pula Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi. Edy Junaedi mengungkapkan prinsip dasar perizinan usaha berbasis risiko yakni *trust but verify*.

"Artinya kepada pelaku usaha diberikan kepercayaan penuh untuk mengisi data-data usaha yang valid dan nanti sistem OSS akan memverifikasi terhadap pengisian data-data tersebut," ujar Edy.

Agus Cahyono Adi menyampaikan ke depannya diharapkan sistem OSS PBBR juga akan terintegrasi dengan Aplikasi Perizinan ESDM.

"Kami dari Pusdatin ESDM men-support bagaimana integrasi dari OSS dengan Kementerian ESDM untuk memastikan persyaratan teknis masuk semua, terverifikasi dengan baik, dan terkomunikasikan kepada bapak/ibu sekalian," tandas Agus.

Webinar Kemudahan Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi dan kebijakan terkini terkait perizinan berusaha kepada para pemangku kepentingan, khususnya pascaberlakunya UUCK. Webinar ini diikuti oleh pemerintah daerah, pelaku usaha sektor ketenagalistrikan, dan asosiasi sektor ketenagalistrikan. (AMH)

PENGEMBANGAN ENERGI SURYA MENJADI PRIORITAS KEBIJAKAN ENERGI



Menteri Arifin Tasrif pada acara Webinar Gatra Apresiasi Energi 2021 dengan tema "Kemandirian Kebutuhan Energi sebagai Kunci Keberhasilan Kebangkitan Perekonomian Nasional" yang digelar oleh Gatra Media Group, Kamis (30/9).

Arah kebijakan energi Indonesia depan adalah transisi energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pada pengembangan energi surya karena biaya investasi yang rendah dan waktu implementasi yang singkat.

Hal tersebut diampaikan oleh Menteri Arifin Tasrif pada acara Webinar Gatra Apresiasi Energi 2021 dengan tema "Kemandirian Kebutuhan Energi sebagai Kunci Keberhasilan Kebangkitan Perekonomian Nasional" yang digelar oleh Gatra Media Group, Kamis (30/9).

"Fokus pengembangan EBT, seperti di daerah perbatasan dimana kebutuhan energi yang terus meningkat, maka harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur energi yang lebih masif dan tepat guna," ujar arifin.

Pandemi covid-19 global selama satu setengah tahun ini disebut Arifin telah memberikan dampak yang begitu besar bagi perekonomian nasional. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya memulihkan sektor perekonomian yang berfokus pada kegiatan produktif dengan tetap memberikan rasa aman dan nyaman di tengah pengendalian penyebaran covid19.

Indonesia disebutnya tengah dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat ekonomi nasional kearah ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan. Sektor energi diharapkan dapat mengambil peran penting melalui langkah yang inovatif dan sikap kolaboratif untuk dapat mewujudkan kemandirian dan

ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Arah kebijakan tersebut oleh Kementerian ESDM dituangkan dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) yang diharapkan mampu membuahkan solusi untuk tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional yang dihadapi saat ini. Pada GSEN telah dipetakan kapasitas untuk ditambahkan kapasitas EBT sebesar 38 GW sampai tahun 2035 melalui upaya percepatan substitusi energi primer, konversi energi primer fosil, dan penambahan kapasitas EBT.

"Harapannya dengan adanya substitusi ini, sesuai target kita sebelum tahun 2030 bisa menghentikan impor energi terutama impor BBM dan LPG yang pada akhirnya akan mengurangi beban devisa nasional serta meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi kita," ujar Arifin.

Program-program tersebut mendukung transformasi energi menuju *net zero emission* pada tahun 2060. Pemilihan teknologi menjadi prioritas utama guna memastikan ketersediaan, kemudahan, keterjangkauan, keberlangsungan, dan daya saing untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi yang berkelanjutan serta rendah karbon.

"Kita membutuhkan kerja yang luar biasa dan sinergi yang baik dalam mengimplementasikan program tersebut. Untuk itu kami mengajak semua pihak terutama kepada insan energi untuk terus berkontribusi dan memberikan sumbangsih demi terciptanya tata kelola yang lebih baik dalam membangun ekosistem sektor energi yang adaptif, progresif, dan andal," tutup Arifin.(U)

KOLABORASI TINGKATKAN ENERGI HIJAU



Pemerintah turut berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendorong keberhasilan pengembangan EBT untuk peningkatan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia, demi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam acara Tempo Energi Day 2021 yang bertemakan "Energi Bersih Untuk Indonesia" secara daring, Kamis (21/10/2021).

Program Tempo Energi Day ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Energi Sedunia, juga sebagai forum kolaborasi para pihak untuk mempersiapkan sektor energi baru terbarukan yang kompetitif, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya dan langkah mewujudkan bauran energi baru terbarukan, sehingga dapat meraih keadilan, kedaulatan dan kemandirian energi di masa depan.

Sesuai dengan amanat UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29 - 41% pada tahun 2030.

"Dari target tersebut, sektor energi diharapkan dapat berkontribusi menurunkan emisi sebesar 314-398 Juta Ton CO₂e, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi, serta melakukan penerapan teknologi energi bersih," ujar Arifin.

Dalam rangka untuk mendukung transformasi perekonomian Indonesia ke arah ekonomi hijau yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan melalui pembangunan rendah karbon, maka arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi dari energi fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Pemerintah saat ini telah menyusun *Grand Strategi Energi Nasional*

yang bertujuan untuk mewujudkan bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi.

Pada *Grand Strategi Energi*, telah dipetakan rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 38 GW sampai tahun 2035 dengan memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasi yang rendah dan waktu implementasi yang singkat serta membuka peluang ekspor listrik EBT melalui *ASEAN Power Grid*. Upaya lainnya antara lain melalui substitusi energi final, konversi energi primer fosil, pemanfaatan EBT non listrik/non BBN.

Dalam rangka mencapai target penurunan emisi, telah disusun roadmap menuju *Net Zero Emission 2021-2060* dengan strategi utama antara lain yaitu "Pengembangan EBT secara masif untuk mencapai target 100% dalam bauran energi pada tahun 2060," ungkap Arifin.

Kedua, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan *pump storage*, *Battery Energy Storage System (BESS)*, dan *hydrogen fuel cell* secara bertahap, serta pengembangan interkoneksi transmisi dan penerapan smart grid.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menambahkan "Kita tidak lagi menerima usulan PLTU baru, artinya pasca 2030 tidak akan ada lagi pembangunan pembangkit yang berbasis fosil, tapi semuanya EBT."

Rida menilai RUPTL PLN yang baru disahkan ini sebenarnya merupakan RUPTL *greener* dalam sejarah Indonesia. Sebab, kapasitas pembangkit listrik dari EBT akan mendominasi. Dalam RUPTL yang lama, kata dia, porsi EBT di pembangkit listrik hanya 30 persen. Tapi dalam RUPTL yang baru, langsung naik 51,6 persen dalam 10 tahun ke depan sampai 2030. "Jadi ada gestur dan sinyal dari pemerintah, terkait komitmen pada *Paris Agreement*," ujar Rida.

Saat ini pemerintah sedang menyusun rencana pensiun dini atau *early retirement* dari PLTU batu bara yang kini ada di Indonesia. Selain menutup usulan proyek baru pembangunan PLTU, pemerintah juga mengharuskan PLTU yang ada untuk menggunakan biomassa sebagai campuran bahan bakar hingga program pensiun dini pembangkit fosil batu bara.

"Setelah 2030 tidak akan ada lagi pembangunan pembangkit yang berbasis fosil, semuanya harus pembangkit berbasis energi baru terbarukan," tutup Rida. (AT)

GGTC 2021: MAHASISWA DIMINTA BERSIAP HADAPI TRANSFORMASI DIGITAL ENERGI LISTRIK



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana membuka acara Gatrik Goes to Campus (GGTC) 2021 yang dilakukan secara virtual, Selasa (19/10/2021).

Transformasi teknologi ketenagalistrikan termasuk digitalisasi akan berkembang dengan sangat cepat khususnya pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Sejalan dengan hal itu, sektor ketenagalistrikan terus bertransformasi mewujudkan penyediaan energi listrik yang lebih modern. Seluruh pihak termasuk mahasiswa diharapkan bersiap-siap menghadapi transformasi tersebut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan hal tersebut dalam Gatrik Goes to Campus (GGTC) 2021 yang dilakukan secara virtual, Selasa (19/10/2021). GGTC bertema "Transformasi Digital Energi Listrik" ini diikuti oleh mahasiswa lintas jurusan dari berbagai universitas/ perguruan tinggi.

"Ke depan, energi listrik akan menjadi pilihan prioritas baik untuk aktivitas industri, rumah tangga, hiburan, hingga transportasi," ujar Rida mengawali sambutannya. Menurutnya, penggunaan kendaraan bermotor listrik dan kompor induksi listrik merupakan bentuk pemanfaatan energi listrik yang terus didorong saat ini.

"Melihat perkembangan transformasi digital energi listrik tersebut, kita semua harus dapat mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan memberkahi diri, penerapan teknologi khususnya di sektor ketenagalistrikan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia," ucapnya.

Tren Kelistrikan di Masa Depan

Saat ini, muncul tren di berbagai negara termasuk Indonesia untuk beralih dari kendaraan konvensional ke *electric vehicle* atau biasa disebut kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

"Dengan beralih ke kendaraan listrik, diharapkan kita dapat mengurangi pemakaian dan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Kualitas udara yang dihasilkan juga diharapkan lebih bersih karena KBLBB ini tidak menimbulkan polusi," tutur Rida.

Untuk mempercepat ekosistem KBLBB di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membawahkan Ditjen Ketenagalistrikan mendapatkan tugas untuk mengatur penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB yang terkait ketentuan ketenagalistrikan, tarif tenaga listrik, serta standar dan keselamatan ketenagalistrikan

"Ke depan bagi teman-teman mahasiswa yang sudah beralih ke kendaraan listrik, kalau mau mengisi energi untuk kendaraannya tidak ke SPBU lagi, tapi nge-charge di rumah atau di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Atau bisa juga nge-swap baterai kendaraan listrik di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)," Rida menjelaskan.

Rida menyebut selain mendorong pemanfaatan listrik untuk transportasi masa depan, Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk mulai memanfaatkan listrik di rumah tangga, salah satunya memasak dengan menggunakan kompor induksi listrik.



la lantas menyampaikan perkembangan sistem energi akhir-akhir ini mengalami transformasi yang sangat signifikan.

"Konsumen listrik mengalami transformasi yang semula hanya sebagai pelanggan listrik, berubah dapat memproduksi, menyimpan, dan menjual listrik kepada produsen atau sesama konsumen listrik. Hal ini sudah terlihat dengan dimulainya pemanfaatan PLTS Atap di industri dan rumah tangga yang dapat menyimpan kelebihan listriknya ke PLN," Rida mengungkapkan.

Dengan berkembangnya teknologi otomatisasi, Rida melanjutkan, konsumen listrik juga akan semakin cerdas untuk memanfaatkan listriknya se-efisien mungkin dengan penggunaan peralatan-peralatan canggih, seperti *smart meters* dan *smart devices*.

Tentang GGTC

GGTC adalah salah satu upaya Ditjen Ketenagalistrikan dalam mendekatkan program dan kebijakan ketenagalistrikan kepada mahasiswa. Sesuai dengan target sarannya, acara ini dikemas secara fun dan santai.

"Melalui kegiatan GGTC tahun ini, Ditjen Ketenagalistrikan mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk memahami transformasi digital energi listrik di masa depan dan dapat berdiskusi bagaimana menghadapinya," ujarnya.

Tahun ini adalah tahun kedua Ditjen Ketenagalistrikan menggelar GGTC. Kali ini, Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia digandeng untuk berkolaborasi dalam pelaksanaannya. Narasumber GGTC 2021 adalah Dosen



Hendrianto Pratomo, Blogger & PhD Candidate in *Energy Storage Monash University* Ahmad Amiruddin, dan Sekjen DEM Indonesia Robi Juandry.

Rangkaian GGTC 2021 dimulai dengan pre-event berupa pembuatan vlog *Road to GGTC* di UPN Veteran Yogyakarta pada 23 September 2021, lomba Twibbon GGTC pada 1-17 Oktober 2021, serta *Live Instagram @Infogatrik* pada 12 Oktober 2021. Saat pelaksanaan acara, GGTC 2021 juga dimeriahkan dengan kuis berhadiah untuk para peserta. (AMH)

PEMERINTAH

Dukung Inovasi Kelistrikan PT PLN (Persero)



LIKE PLN 2021 yang mengangkat tema "Peningkatan Pendapatan, Efisiensi, dan Peningkatan Pelayanan Pelanggan." secara daring, Selasa (19/10/2021).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi kegiatan *Learning, Innovation, Knowledge, and Exhibition* (LIKE) PLN sebagai wujud optimisme dalam rangka berbagi pengetahuan, mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pegawai.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam *opening ceremony* acara LIKE PLN 2021 yang mengangkat tema "Peningkatan Pendapatan, Efisiensi, dan Peningkatan Pelayanan Pelanggan." secara daring, Selasa (19/10/2021).

LIKE PLN merupakan ajang berbagi pengetahuan dan pemberian penghargaan bagi pegawai-pegawai PLN yang kreatif, inovatif dan penuh spirit. Melalui LIKE PLN diharapkan terbentuk budaya pengelolaan pengetahuan yang menghasilkan produk-produk inovasi yang dapat menghasilkan *value creation* untuk mendukung pencapaian target kinerja PLN serta dapat menciptakan *profit beyond kwh* bagi PLN ke depannya.

Pada kesempatan yang sama Direktur

Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan "PLN terus berkomitmen dan berupaya terus menerus melakukan inovasi di berbagai bidang untuk menunjang keberhasilan dan juga keberlangsungan bisnis PLN, dengan tujuan peningkatan pendapatan, peningkatan efisiensi baik teknis maupun non teknis," ujar Zulkifli.

Rida menyebut semangat "*INNOVATION FOR TRANSFORMATION*" yang digaungkan oleh PT PLN (Persero) penting dan relevan untuk diterapkan kepada pegawai PT PLN (Persero) di seluruh Nusantara.

"Dengan berlandaskan semangat tersebut, saya yakin PLN dapat bertransformasi mewujudkan bisnis ketenagalistrikan yang lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat," ungkap Rida.

Inovasi merupakan penggerak penting dalam penyelesaian berbagai macam permasalahan, tidak terkecuali pada sektor energi.

"Kami manajemen PLN berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong minat semangat PLN group untuk selalu

berinovasi dan berkarya untuk menghasilkan *value creation* yang dapat mendukung pencapaian kinerja PLN serta menciptakan *profit beyond kwh* untuk PLN kedepan karena PLN adalah perusahaan masa depan," pungkask Zulkifli.

Pemerintah berharap acara LIKE PLN tahun ini dapat mejadi katalis untuk inovasi di bidang ketenagalistrikan khususnya dalam hal penguasaan teknologi berbasis EBT untuk mendukung perencanaan transisi energi menuju energi bersih yang telah ditetapkan pada RUPTL PLN 2021-2030, serta manajemen pengelolaan energi primer yang solid dan tahan krisis sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung kontinuitas operasi PLN di masa-masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

"Sekali lagi kami mengapresiasi pelaksanaan LIKE PLN ini sebagai bentuk konkrit semangat PLN untuk bertansformasi dan berkembang menghadapi perubahan zaman. Kami harap apa yang dihasilkan dalam acara ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua," tutup Rida. (AT)

UPAYA DITJEN KETENAGALISTRIKAN UNTUK MAKSIMALKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



Ditjen Ketenagalistrikan telah membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan.

Ditjen Ketenagalistrikan telah membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Penetapan Tim ini merupakan tindak lanjut reviu pengendalian intern Ditjen Ketenagalistrikan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tim Asesor PM Maturitas SPIP ini terbentuk pada tanggal 15 September 2021 dengan Koordinator Keuangan Patar Robinson sebagai Ketua Tim.

"SPIP penting sebagai pedoman untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan," ujar Patar, Rabu (6/10/2021), di Jakarta.

Patar lantas menjelaskan tugas-tugas Tim, di antaranya adalah menyusun rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP serta melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Selain itu, Tim juga melakukan penilaian atas Komponen

Penetapan Tujuan. "Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan ini difokuskan pada dua unsur, meliputi kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis," Patar menjelaskan.

Tugas selanjutnya yakni melakukan penilaian atas Komponen Struktur dan Proses, juga menilai Komponen Pencapaian Tujuan. Patar menyebut Komponen Pencapaian Tujuan ini difokuskan pada capaian empat indikator yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tim Asesor PM Maturitas SPIP juga bertugas membuat Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas (LHPM) penyelenggaraan SPIP. "Laporan tersebut akan disampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian," kata Patar.

Selanjutnya, Tim juga bertugas untuk memantau tindak lanjut atas hasil

penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP. Patar menyampaikan hal itu meliputi pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* (AOI), dan rencana aksinya.

Salah satu bentuk pengendalian adalah dengan mitigasi resiko. Ditjen Ketenagalistrikan telah memiliki Daftar Resiko (*Risk Register*) yang dievaluasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Saat ini, Daftar Resiko Ditjen Ketenagalistrikan sedang dievaluasi kembali terkait dengan proses bisnis dan perjanjian kinerja.

Ditjen Ketenagalistrikan telah membuat Perjanjian Kinerja 2021 dengan sembilan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
2. Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif
4. Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas
5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
6. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan
7. Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan sumber daya manusia yang unggul
8. Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal
9. Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang optimal. (AMH)

PENGEMBANGAN KBLBB HARUS DIIMBANGI SDM KOMPETEN

Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong program percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan. Dalam membangun infrastruktur KBLBB, tenaga teknis yang kompeten memiliki peranan yang sangat penting agar program tersebut bisa berjalan dengan optimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam Seminar 20 Tahun BPSDM Berkarya Untuk Negeri dengan tema "Strategi Penyiapan Sumber Daya Manusia Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Transisi Pengelolaan Energi Bersih Pasca Pandemi Covid-19" di Jakarta, (13/10).

"Penting untuk disosialisasikan kepada seluruh badan usaha SPKLU agar setiap tenaga teknik dipastikan sertifikat kompetensinya, karena keselamatan bisa terjamin apabila tenaga teknis sudah kompeten," ujar Rida.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disampaikan Rida hingga saat ini telah melakukan kerjasama dengan tiga Kementerian/

Lembaga, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan Peserta Didik Sekolah Menengah

Kejuruan, dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan Bagi Peserta Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja, dan kerjasama dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Nasional tentang Harmonisasi Skema Sertifikasi dan Penilaian Uji Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan.

"Ini semua dilakukan untuk melakukan link and match antara institusi pendidikan yang menyediakan SDM dengan apa yang dibutuhkan di lapangan," ungkapnya.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai kebijakan dalam menyusun roadmap Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga tahun 2024 baik yang dibangun oleh pemerintah maupun pihak swasta.



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam Seminar 20 Tahun BPSDM Berkarya Untuk Negeri dengan tema "Strategi Penyiapan Sumber Daya Manusia Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Transisi Pengelolaan Energi Bersih Pasca Pandemi Covid-19" di Jakarta, (13/10).

Peraturan ini mengatur terkait Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan area bisnis untuk infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB baik itu untuk SPKLU maupun SPBKLU. Peraturan ini juga menugaskan kepada PT PLN (Persero) sebagai awalan untuk membangun infrastruktur pengisian listrik dan dalam pelaksanaannya PLN dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau badan usaha lainnya.

Rida menyebut tarif tenaga listrik yang diberlakukan pada pengisian listrik KBLBB berdasarkan ketentuan yang disediakan oleh PT PLN (Persero) diantaranya tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah ditetapkan sebesar 714,07 rupiah per kWh untuk pengisian listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi (PLN) kepada pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLU. Kemudian tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus, pengisian listrik dari Badan Usaha SPKLU kepada pemilik KBLBB sebesar 2.467 rupiah per kWh.

"Pembangunan fasilitas pengisian listrik untuk KBLBB juga wajib memperhatikan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Lembaga Inspeksi Teknik serta memperhatikan kesesuaian standar produk dari stasiun pengisian oleh Lembaga Sertifikasi Produk baik itu dari KESDM maupun Badan Sertifikasi Nasional (BSN)," ungkap Rida.

Berdasarkan *Grand Strategi Energi* (GSE) yang telah disusun, target hingga tahun 2030 akan terbangun 31.859 unit SPKLU dan 67.000 unit SPBKLU untuk menyediakan listrik pada KBLBB yang diperkirakan jumlahnya berpotensi akan melonjak pada tahun 2030 sekitar 13 juta unit untuk kendaraan roda 2 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 4.

Hingga September 2021 telah terpasang 187 unit SPKLU pada 155 lokasi di seluruh Indonesia, adapun untuk Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) sudah terpasang 153 unit pada 86 lokasi di Jakarta dan Tangerang.

"Seperti yang sudah saya sampaikan, SPKLU sampai September jumlahnya 187, maka proyeksi kami total semua kebutuhan tenaga teknik mulai dari konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, hingga pemeliharaan untuk eksisting SPKLU yang sudah ada harusnya sudah melibatkan 1.870 orang tenaga teknis. Sedangkan, jumlah Tenaga Teknik Ketenagalistrikan SPKLU yang sudah memiliki sertifikat kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi hingga saat ini baru berjumlah 87 orang tenaga teknik," ungkap Rida menjelaskan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Esdm Prahoro Yulijanto Nurtjahyo menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan

memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan energi, infrastruktur, dan tenaga kerja yang berkualitas.

"Transisi energi bersih dengan implementasi Energi Baru Terbarukan akan membuka banyak lapangan kerja, besar harapan kami hal ini dapat menampung SDM yang kompeten dan produktif," ujar Prahoro.

Purnomo Yusgiantoro Menteri ESDM periode 2000-2009 yang turut hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan dalam masa transisi energi bersih dibutuhkan SDM yang berpikir antisipatif (*thinking ahead*), inovatif (*thinking again*), dan adaptif (*thinking across*) serta menciptakan proses kegiatan pemerintahan ESDM yang gesit (*agile*).

Rida menjelaskan bahwa semua program yang dicanangkan pemerintah dalam akselerasi transisi energi bersih harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. "Semua program ini memerlukan SDM yang handal, program dan rencana yang bagus namun pelaksana kurang kompeten bisa dibayangkan bagaimana hasilnya. SDM akan selalu menjadi penentu akan berjalannya suatu program kedepannya," tutup Rida. (U)



DORONG PENGEMBANGAN PLTS ATAP, PEMERINTAH TERBITKAN ATURAN TERBARU

Dalam rangka mendorong pengembangan PLTS Atap, pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No 26 Tahun 2021 sebagai pengganti Permen ESDM No 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh konsumen PT PLN (Persero). Dorongan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung *Paris Agreement* dalam rangka mewujudkan Energi Bersih dan pencapaian target EBT sebesar 23% di tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana di Jakarta, Selasa (28/09) mewakili Menteri ESDM dalam acara Digital Festival Hari Listrik Nasional ke-76. Acara ini diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sebagai rangkaian Hari Listrik Nasional (HLN) ke-76 dengan tema “Kebangkitan Industri Ketenagalistrikan Nasional untuk Mendukung Kebijakan Energi Bersih”.

“Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan bauran pembangkit EBT diantaranya, mendorong pembangunan PLTS secara masif sekitar 4.680 MW (termasuk memanfaatkan waduk PLTA (PLTS terapung) dan lahan bekas tambang),” ungkap Rida. Selain itu pemerintah juga mendorong pemanfaatan biomassa sebagai campuran batubara (*cofiring*) di pembangkit PLTU, serta dengan mengubah pembangkit diesel langsung ke pembangkit EBT atau secara hybrid PLTD dengan pembangkit Energi Terbarukan.

Pemerintah juga telah merevisi *Grid Code* (Aturan Jaringan Tenaga Listrik) melalui Permen ESDM No 20 Tahun 2020 untuk meningkatkan fleksibilitas sistem tenaga listrik khususnya untuk mengakomodasi penetrasi *Variable Renewable Energy* (VRE) yang semakin meningkat.

Pemerintah terus mendorong transisi dari energi fosil menuju energi bersih melalui peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam pemutakhiran RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 yang saat ini sedang disusun, porsi pembangkit EBT 20.923 MW (51,6%) lebih besar dari pembangkit fosil 19.652 MW (48,4%) dari total tambahan kapasitas pembangkit 40.575 MW.

“Dibandingkan dengan RUPTL PLN sebelumnya (2019-2028), dimana porsi pembangkit EBT 30% dan pembangkit fosil 70%, RUPTL terbaru dapat dikatakan sebagai lebih hijau atau greener,” ujar Rida menjelaskan.

Dalam RUPTL terbaru ini diperkirakan terjadi penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sekitar 70,23 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Selain itu, Pemerintah juga tengah menyusun draft Perpres Tarif EBT yang mengatur tentang pembelian tenaga listrik dan harga

patokan pembelian tenaga listrik EBT oleh PLN dalam rangka mempercepat bauran EBT sesuai amanah regulasi.

Kementerian ESDM terus berupaya mendorong pelaku usaha ketenagalistrikan untuk menyediakan pasokan listrik yang cukup melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk memperhatikan rantai pasok energi primernya dan mulai mengutamakan pemanfaatan Energi Terbarukan dalam perencanaannya.

Dalam upaya mendukung pengembangan EBT secara massif tersebut, perlu didukung pengembangan industri peralatan dan teknologi berbasis EBT seperti Panel Surya, Baterai, Inverter, Turbin Air dan Angin, termasuk juga peralatan Smart Grid agar dapat diproduksi di dalam negeri. Pemerintah menyadari hal ini merupakan potensi dan momentum yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah mengajak seluruh pelaku usaha dan produsen Industri Ketenagalistrikan dalam negeri untuk berkontribusi dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Jisman Hutajulu menyampaikan bahwa saat ini PLN telah mengajukan Draft RUPTL 2021-2030. Jisman menyampaikan bahwa pemerintah telah menugaskan PLN untuk fokus pada transmisi dan distribusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik dan meningkatkan kehandalan jaringan, sehingga pada tahun 2022, 100% rasio elektrifikasi akan tercapai.

“Selanjutnya, tidak akan ada lagi perencanaan tambahan PLTU baru, kecuali yang telah financial closing atau sedang konstruksi. Dan selama 10 tahun ke depan, Indonesia akan mengembangkan lebih banyak pembangkit EBT dibanding pembangkit fosil,” ujar Jisman menegaskan.

Pengembangan subsektor ketenagalistrikan di Indonesia tengah memasuki era baru dimana Energi Baru Terbarukan menjadi fokus pengembangan dan media transisi menuju energi yang lebih bersih dengan tetap berprinsip pada ketersediaan listrik dalam jumlah cukup, berkualitas baik, dan harga wajar. Kementerian ESDM menyadari hal tersebut memerlukan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk peran Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia dan pelaku usaha industri ketenagalistrikan dalam mendukung Kebijakan Energi Bersih dan keberhasilan transformasi sektor ketenagalistrikan.

“Melalui momentum Hari Listrik Nasional ini, kita semua dituntut untuk bangkit dan terus melanjutkan pembangunan di subsektor ketenagalistrikan, termasuk menjalankan transisi energi ke energi yang lebih bersih dan sustain,” tutup Rida. (U)



Rasio Elektrifikasi Indonesia Naik Mencapai 99,4%

Pemerintah mencatat rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia telah mencapai 99,4%. Tahun depan diharapkan rasio elektrifikasi mencapai 100%. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-76 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (28/09/2021).

"Saat ini, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,4%, dan tahun depan ditargetkan seluruh rumah tangga telah teraliri listrik 100%," ujar Arifin.

Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-76, yang jatuh pada 28 September 2021 ini mengambil tema Energi Tumbuh, Energi Tangguh. Sejalan dengan tema tersebut, menurut Arifin, kontribusi dan kinerja sektor ESDM pun terus tumbuh positif di tengah kondisi pandemi covid-19 yang mulai terkendali.

Pemerintah telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), yang diharapkan mampu membuahkan solusi untuk tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

"GSEN diharapkan mampu menjadi jawaban dari tantangan yang saat ini dihadapi, antara lain keterbatasan pengembangan energi baru terbarukan dan tuntutan pembangunan infrastruktur yang lebih masif serta tepat guna," ungkap Arifin.

Dalam *Grand Strategi Energi Nasional*, telah dipetakan rencana penambahan kapasitas EBT sebesar 38 Giga Watt (GW) sampai dengan 2035 melalui upaya percepatan substitusi energi primer/final, konversi energi primer fosil, penambahan kapasitas EBT dan pemanfaatan EBT non listrik/non BBN.

"Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasi yang rendah dan waktu pelaksanaan yang singkat," ujar Arifin.

Program-program tersebut, lanjutnya, mendukung target transformasi energi menuju *net zero emission* (NZE), yang menjadi komitmen bersama untuk dicapai paling lambat pada 2060 atau bisa lebih cepat lagi dengan bantuan internasional.

Pemilihan teknologi menjadi pertimbangan utama guna memastikan ketersediaan, kemudahan, keterjangkauan, keberlangsungan dan daya saing untuk mencapai kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan, serta ketahanan iklim dan rendah karbon.

Demi mencapai penurunan emisi saat ini juga sedang disusun strategi jangka panjang sektor menuju karbon netral. Skenario yang disusun oleh berbagai badan lintas mencakup beberapa upaya yang akan dilakukan untuk Indonesia untuk mencapai emisi *net zero*, "antara lain melalui pengembangan EBT secara masif, pengurangan pemanfaatan energi fosil, pemanfaatan teknologi CCS/CCUS, pemanfaatan kendaraan listrik, dan pengembangan interkoneksi smart grid," tegas Arifin.

Hingga Juli tahun ini, kontribusi sektor ESDM dalam penerimaan negara mencapai Rp141 triliun atau lebih tinggi 103% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan investasi ESDM telah mencapai USD12,3 miliar.

Pemerintah berupaya mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025. "Pengembangan EBT salah satu fokus kita saat ini, bauran EBT kita 11,2%. Capaian ini masih jauh dari 23% di tahun 2025," ungkap Arifin.

Dalam kesempatan yang sama Arifin mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan atas keberhasilannya dalam pemikiran, kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan pembangunan serta penemuan baru di sektor energi dan sumber daya mineral, yang memberikan dampak kemajuan yang sangat berarti dalam pembangunan nasional.

Berikut adalah nama-nama pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mendapatkan penghargaan: Satyalancana Wira Karya:

1. Rida Mulyana
Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Madya:
1. Ir. Munir Ahmad
2. Nur Hidayanto, S.T., M.T.
3. Sansuadi, S.Kom, M.B.A.
4. Pandu Satria Jati Bonifasius, S.IP, M.Si.
Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda:
1. Ir. Wanhar
2. Muhadi, S.T., M.T.
3. Elif Doka Marliska, S.T., M.T.
4. C. Ripura Sewana Sigit, S.T.
5. Budiono, S.T., M.T.
6. Taufiq Mardiansyah, S.T.

"Saya mengapresiasi kinerja Bapak/Ibu sekalian di tengah pandemi ini tetap berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada Bangsa dan Negara khususnya untuk kemajuan sektor energi dan sumber daya mineral," tutup Arifin (AT).

KEMENTERIAN ESDM UNGKAP STRATEGI JAGA KEANDALAN LISTRIK PON XX PAPUA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung suksesnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dengan memastikan keandalan listrik di Papua. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, Jumat (1/10/2021), mengungkapkan tiga strategi untuk memenuhi keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan PON.

"Selama penyelenggaraan PON XX, dilakukan pengamanan operasi dengan *Zero Down Time* (ZDT). Artinya, keandalan pasokan listrik sangat dijaga agar tidak terjadi kedip listrik," ujar Wanhar menyebut strategi pertama, Jumat (1/10/2021), di Jakarta.

Ia menjelaskan ZDT dilakukan dengan sistem switching suplai listrik yang dilengkapi *Automatic Changeover Switch* (ACOS), dan menempatkan backup berlapis meliputi minimal 2 (dua) layer pasokan cadangan yaitu melalui *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dan *mobile* genset yang telah berhasil diuji/disimulasikan.

Strategi kedua adalah dengan membangun infrastruktur ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp308,8 miliar yang pekerjaannya telah dilaksanakan sejak tahun 2020.

Wanhar lantas menyebut strategi ketiga, yakni PT PLN (Persero) telah proaktif mensosialisasikan Pasang Baru Multiguna. "Pasang Baru Multiguna ini bersifat sementara sesuai kebutuhan

bagi *venue* pertandingan maupun fasilitas penunjang/akomodasi non-hotel," kata Wanhar. Ia menyebut penambahan daya tersebut dapat segera dipenuhi sebelum pelaksanaan PON XX dimulai.

Wanhar lalu menyampaikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PLN telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas status terakhir dan memastikan kesiapan pemenuhan keandalan pasokan listrik untuk PON XX di Papua pada 28 September 2021.

"Dalam rapat tersebut, PLN menyampaikan bahwa pasokan listrik telah dinyatakan siap 100% untuk memasok ke seluruh *venue* dan tempat strategis lainnya yang pelaksanaannya juga dikoordinasikan langsung dengan Panitia Besar PON," ujarnya.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX di Papua, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN juga membentuk Tim Posko Monitoring



PON XX
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL
PAPUA
2020

Pasokan Listrik PON XX mulai H-1 dari pembukaan sampai dengan H+1 penutupan.

"Berdasarkan laporan Tim Posko shift 1 tanggal 1 Oktober 2021 hingga pukul 13.00 WIB, tidak ada gangguan sistem/subsistem yang menyebabkan pemadaman pada *venue* PON," ucap Wanhar.

Ia lalu merinci bahwa Sistem Jayapura memiliki daya mampu pasok 126,40 MW (cadangan 30,13 MW atau 23,8%), Sistem Timika 38,50 MW (cadangan 10,08 MW atau 26,18%), dan Sistem Merauke 48,51 MW (cadangan 25,71 MW atau 52,99%). "Ketiga sistem tersebut statusnya normal," tutur Wanhar.

Kesiagaan pengamanan pasokan listrik untuk PON XX Papua dilaksanakan mulai 18 September–15 Oktober 2021 dengan melibatkan sebanyak 1.574 personil yang tersebar di empat kota/kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Timika. (AMH)

10 PEMBANGKIT

RAIH PENGHARGAAN SUBROTO 2021 BIDANG K2

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-76, Kementerian ESDM menyelenggarakan penganugerahan Penghargaan Subroto 2021 kepada para stakeholder yang turut berperan aktif membangun sektor energi dan mineral. Dari Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan, 10 Pembangkit Listrik berhasil meraih penghargaan pada Penghargaan Subroto tahun 2021 ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan penganugerahan Penghargaan Subroto 2021 tersebut kepada para pemenang Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan di Jakarta pada Selasa, (28/09).

"Hal ini untuk memberikan kita semangat bagi kita semua khususnya generasi-generasi muda untuk berkontribusi yang lebih lagi bagi sektor energi," ujar Arifin.

10 Pembangkit Listrik yang memperoleh Penghargaan Subroto 2021 Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan antara lain: PLTU Paiton 1&2, PLTU Tenayan, PLTU Belitung, PLTU Tidore, PLTGU Gresik, PLTGU Keramasan, PLTG Maleo, PLTA Cirata, PLTA Sutami, dan PLTA Tulungagung. Arifin menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi Indonesia saat ini telah mencapai 99,4% dan tahun depan ditargetkan seluruh rumah tangga sudah dialiri listrik 100%. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga terus dipercepat untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan energi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertambangan dan Energi 1978-1988 Subroto menyampaikan bahwa Indonesia yang saat ini sedang memasuki transisi energi menghadapi tiga tantangan yaitu target pengurangan emisi, pengurangan dampak kepada lingkungan, dan kecepatan dalam menggunakan sumber daya EBT untuk menggantikan *fossil fuel*.

"Bukan pekerjaan yang gampang, Kementerian ESDM menjadi pelopor dalam mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan perorangan untuk bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita terutama mengenai lingkungan," ujar Subroto.

yang diwujudkan dengan transisi energi menuju energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan rendah karbon.

Hampir seluruh Negara di dunia berkomitmen mengatasi perubahan iklim melalui *Paris Agreement*. Dalam *roadmap net zero emission*, Indonesia menargetkan 100% pembangkit EBT bisa terwujud lebih cepat dari 2060. Saat ini pemerintah sedang finalisasi regulasi terkait harga EBT agar lebih menarik bagi investor. Selain itu Peraturan Menteri ESDM terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap juga siap untuk diimplementasikan.

Pemerintah juga mendorong peran generasi muda untuk mempercepat EBT, antara lain melalui Program Patriot Energi, dan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau GERILYA. "Kami berharap para pelaku usaha energi juga semakin aktif mendukung program transisi energi menuju *net zero emission* dengan berbagai strategi. Transisi energi harus menjadi komitmen kita bersama," tutup Arifin.

Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada para stakeholder yang berkontribusi dalam memajukan sektor ESDM. Tahun ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan penghargaan yang diambil dari nama Prof Subroto selaku Menteri Pertambangan dan Energi periode 1978-1988. (U)



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan penganugerahan Penghargaan Subroto 2021 tersebut kepada para pemenang Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan di Jakarta pada Selasa, (28/09).

LANTIK PEJABAT FUNGSIONAL, DIRJEN GATRIK: BERIKAN PELAYANAN TERBAIK UNTUK MASYARAKAT

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan pentingnya menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK sebagai fondasi budaya kerja ASN yang profesional. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Dengan nilai dasar BerAKHLAK, diharapkan setiap ASN mempunyai orientasi yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik. Jadi kita kerja buat apa sih? Ya untuk BerAKHLAK, baik secara akronim maupun sesuai keyakinan kita, yang pada akhirnya masyarakat yang kita layani bisa mendapatkan manfaat dari situ,” ujar Rida.

Rida menyampaikan hal tersebut saat melantik tiga Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada Rabu (29/9/2021). Dalam kesempatan yang sama, Rida juga melakukan Penyerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun kepada 6 orang pegawai dan X Tahun kepada 23 pegawai, serta menyerahkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2021 kepada 21 pegawai di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan.

“Penetapan *core values* ASN BerAKHLAK dilakukan sebagai akselerasi transformasi ASN. Momentum perubahan ini tentu saja pada saatnya mendukung pelaksanaan program prioritas kerja Presiden Joko Widodo khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK,” ucap Rida.



Pelantikan tiga Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada Rabu (29/9/2021).

Ia lalu menyampaikan percepatan reformasi birokrasi diperlukan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis. Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan.

“Perubahan menuju birokrasi dinamis tentu tidak bisa diraih serta merta dan memerlukan proses. Untuk itulah kemudian kita dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK tadi, kita membentuk karakter kita dan perbaikan reformasi birokrasi juga dilakukan secara bertahap,” tutur Rida.

Rida lalu mengingatkan adanya regulasi terbaru mengenai disiplin Pegawai negeri sipil (PNS). Ia menyebut ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kebijakan mengenai disiplin PNS ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Agustus 2021.

“Untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel serta mendorong PNS lebih produktif, maka diperlukan peraturan disiplin PNS sebagai pedoman,” kata Rida.

Acara ini dilakukan secara hybrid dengan perwakilan pegawai dan pejabat eselon II Ditjen Ketenagalistrikan sebagai saksi hadir di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sementara pegawai lainnya mengikuti secara daring. Pelantikan ini juga disaksikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rizwi Jilanisaf Hisjam melalui Zoom.

“Semoga dengan kenaikan jenjang jabatan ini Saudara dapat mengembangkan karier sekaligus juga meningkatkan profesionalisme yang ujung-ujungnya seperti yang kita inginkan semua adalah untuk terwujudnya pelayanan prima,” pungkas Rida. (AMH)

AGEN PERUBAHAN DITJEN GATRIK SELENGGARAKAN WEBINAR FINANSIAL UNTUK PEGAWAI MILENIAL

Literasi finansial atau keterampilan dalam mengelola keuangan menjadi hal yang penting untuk dimiliki, terlebih di masa pandemi ketika situasi serba tak menentu. Dalam konteks dunia kerja, sebuah penelitian menunjukkan bahwa satu dari lima pegawai mengalami stres di tempat kerja karena masalah keuangan. Agen Perubahan Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) berinisiatif menyelenggarakan *webinar Financial for Millennials and How to Cope in Pandemic Era* untuk meningkatkan literasi finansial pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Webinar ini diselenggarakan pada Selasa (28/9/2021) dengan narasumber Muty Djuhari CFP dari QM *Financial*.

Sekretaris Ditjen Gatrik Munir Ahmad saat membuka acara menyampaikan bahwa generasi milenial sudah menjadi golongan mayoritas yang mengisi posisi pada Ditjen Gatrik.

"Jumlah generasi milenial di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yakni pegawai dengan kelahiran antara tahun 1982 hingga 1995, saat ini jumlahnya mencapai 52,2% dari total PNS. Mereka adalah backbone pelaksanaan tugas fungsi organisasi untuk pencapaian target kinerja organisasi," ujar Munir. Munir menyebut untuk meningkatkan kinerja pegawai agar dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas fungsi jabatannya, penting untuk membekali para pegawai dengan keterampilan mengelola keuangan atau literasi finansial.

"Dari sisi Reformasi Birokrasi, acara ini diharapkan dapat menjadi salah satu implementasi dalam peningkatan perilaku Ber-AKHLAK bagi pegawai Ditjen Gatrik khususnya, dan pegawai Kementerian ESDM pada umumnya," ujar Munir. Ber-AKHLAK merupakan akronim core values ASN yang terdiri dari nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,

Adaptif, dan Kolaboratif.

Munir berharap melalui webinar ini, peserta mendapatkan wawasan dan pengetahuan dasar untuk mengelola keuangan pribadi, penyusunan anggaran pribadi, mengetahui cara memeriksa kesehatan keuangan pribadi, dan membentuk *mindset* untuk berinvestasi, serta mampu mempraktekan *financial plan* melalui training kit yang dibagikan. *Financial trainer* Muty Djuhari dalam paparannya menyampaikan pentingnya merencanakan keuangan. Selain meminimalkan resiko, perencanaan keuangan yang baik juga dapat menentukan masa depan sesuai dengan yang diharapkan.

"Ibarat sebuah rumah yang memerlukan fondasi yang kuat, financial check up juga merupakan fondasi dari sebuah rencana keuangan. Dengan *financial check up*, bisa diketahui sehat dan tidaknya keuangan seseorang," tutur Muty. Ia lalu menjelaskan langkah-langkah financial check up mulai menyiapkan dokumen aset dan utang, mengisi formulir data keuangan, lalu mengecek rasio keuangan.

Muty kemudian mengungkapkan beberapa masalah terkait *cash flow*, termasuk besar pasak daripada tiang, tidak bisa menabung, terhimpit cicilan atau utang yang terlalu besar, dan biaya gaya hidup yang terlalu besar. Ia lalu menjelaskan strategi mengatasi hal-hal tersebut.

"Untuk masalah besar pasak daripada tiang, kita bisa *stick* dengan *budget* kita atau mencari penghasilan tambahan," ujarnya. Terkait keperluan untuk gaya hidup, ia menekankan pentingnya mempunyai rekening khusus.

Ketika keuangan sudah sehat, Muty mengatakan langkah selanjutnya adalah merencanakan tujuan finansial dan investasi. Menurutnya ada lima langkah dalam melakukan investasi, mulai dari menentukan tujuan finansial, mengecek profil resiko investasi, mengenali pilihan produk investasi, menghitung kebutuhan investasi, dan berinvestasi di produk yang melayani tujuan finansial.

Selain paparan materi narasumber, webinar ini juga menghadirkan sesi tanya-jawab, polling, praktek mengisi kertas kerja keuangan, serta diselingi dengan kuis berhadiah. (AMH)



Agen Perubahan Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) menyelenggarakan webinar *Financial for Millennials and How to Cope in Pandemic Era* untuk meningkatkan literasi finansial pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (28/9/2021)

CERITA STUDI DARI CANBERRA, KOTA YANG GUNAKAN 100% ENERGI BERSIH



Indonesia memiliki cita-cita untuk mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Indonesia demi mencapai target tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk turut terlibat dalam pencapaian target tersebut adalah dengan membekali diri dengan ilmu, seperti yang dilakukan oleh David Silalahi ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang tengah melanjutkan Studi *Doktoral Solar Energy* di *Australian National University, Canberra* dimana kota tersebut menggunakan 100% listrik energi bersih.

"Canberra adalah salah satu kota yang 100% menggunakan listrik energi bersih, itu salah satu keunggulan, jadi saya berada langsung di lingkungan yang menggunakan 100% energi bersih," ujar David dalam acara *Talkshow Re-Newable Re-Generation* pada Kamis, (25/11/2021).

David bercerita mengenai pengalamannya melanjutkan studi di Canberra, Australia. Disana ia bergabung dengan perkumpulan energi terbarukan (*Renewable Energy 100% Group*) untuk mempelajari bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai 100% energi bersih agar bisa diterapkan nanti saat pulang ke Indonesia.

"Di sana saya bisa curi ilmu ya, gimana sih mencapai 100% energi surya, dan khususnya energi surya yang saat ini menjadi energi paling bersih," ungkap David.

Indonesia disebut David sebagai negara yang diberkati oleh Tuhan karena memiliki berbagai sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti *geothermal*, *biomass*, dan *hydro*. Namun energi tersebut menurut David tidak akan mencukupi nantinya apabila Indonesia menjadi negara maju yang konsumsi listriknya akan naik berkali-kali lipat.

"Katakanlah konsumsi listrik kita pada tahun 2050 nanti naik 9 kali lipat, kalau dikumpulkan itu sumber EBT tadi nggak cukup potensinya. Jawabannya adalah energi surya karena kita dapat sepanjang tahun, kalau dibandingkan negara Eropa atau Amerika ada musim dingin, nggak sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari," ujar David.

Lebih lanjut David menjelaskan bahwa pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi listrik di Indonesia adalah jalan dalam mencapai kemandirian energi, karena tidak tergantung dari harga komoditas lain seperti batu bara atau gas misalnya. Dan disebut David

harga juga akan stabil karena tidak tergantung harga komoditas lain.

"*Resourcesnya* ada, istilahnya tinggal gelar tikar bahkan saya meneliti di Indonesia itu banyak laut yang tinggi ombaknya tidak sampai dua meter, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai PLTS terapung. Jadi kita potensi yang sangat besar kenapa tidak kita manfaatkan," ujar David.

David juga menyampaikan mengapa ia memilih melanjutkan studi di Australia, karena menurutnya letak Australia tidak terlalu jauh dari Indonesia namun memiliki kampus-kampus terbaik di dunia. David juga menyemangati generasi muda untuk jangan ragu melanjutkan studi di negara lain agar memiliki pengalaman berada di dunia Global dan berdiskusi dengan orang-orang dari negara lain, lalu dapat terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan baik.

Kebiasaan baik lainnya disebut David adalah bagaimana diskusi dilakukan dengan saling berdebat tanpa saling menjatuhkan, berdebat dengan Profesor atau dengan sesama pelajar tetapi ketika sudah keluar dari forum akademik perdebatan selesai. David menambahkan bahwa akses ke jurnal internasional juga tersedia begitu luas disana, dan difasilitasi oleh perpustakaan dengan buku-buku terbaik.

"Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, paling penting itu adalah memantaskan diri dengan persyaratan beasiswa yang diincar, misalnya syaratnya minimal IPK 3 mau tidak mau harus berusaha mendapatkan IPK minimal 3. Jadi kita sudah menyiapkan persyaratan penerimaan beasiswa sehingga saat beasiswa dibuka kita langsung *apply* dan tidak ketinggalan," ungkap David.

Dalam kesempatan yang sama, ASN Direktorat Jenderal EBTKE Shelly Juliavioni yang baru menyelesaikan studi *master of science Sustainable Energy System* di *University Of Edinburgh, UK* menyampaikan bahwa generasi muda di Indonesia harus terpacu untuk melanjutkan studi dimanapun tanpa merasa takut.

"Kalau ada kesempatan lakukan saja, kadang diawal terkendala bahasa atau pertemanan, tapi percayalah itu akan terbalaskan dengan hasil yang kita dapatkan," ungkap Shelly.

David dan Shelly menyemangati generasi muda di Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri agar Indonesia siap bersaing dengan negara-negara lain dalam segala hal.

"Tetap semangat, ayo kita studi energi bersih untuk siapkan target *Net Zero Emission* 2060 agar kita tidak tergantung *consultant* negara lain, jadi kita tingkatkan kemampuan diri kita sendiri untuk mencapai target NZE," tutup David.

BIARPUN UNIT KECIL DAN TERPENCIL, APABILA BERPRESTASI, PASTI AKAN DICARI

(LESSON LEARNED PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PPSDM MIGAS)

Pada tanggal 22 Oktober 2021 lalu, perwakilan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan benchmarking pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada PPSDM Migas yang berlokasi di Jalan Sorogo Nomor 1 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. PPSDM Migas adalah unit Eselon II di lingkungan Kementerian ESDM yang telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2018, mengikuti penilaian WBBM pada tahun 2019 namun gagal sebelum akhirnya mendapatkan predikat WBBM pada tahun 2020. Pengalaman, best practice, dan lesson learned yang dimiliki oleh PPSDM Migas menjadi ilmu yang berharga bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menyukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.



Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan benchmarking pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada PPSDM Migas, Cepu, Jawa Tengah (22/10/2021).

Pentingnya Frontliner yang Prima

Tim Pelaksana Studi Banding Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memasuki gerbang PPSDM Migas dan diwajibkan melakukan screening kesehatan dengan protokol Kesehatan yang ketat serta penukaran *ID Card* dengan kartu pengunjung, sebagai berikut:

- Melakukan pengukuran suhu tubuh;
- Menyerahkan surat hasil test antigen H-1 dengan hasil negatif Covid-19 atau menunjukkan *soft copy* surat hasil tes antigen H-1 dengan hasil negatif Covid-19;
- Menukar *ID Card* dengan kartu pengunjung. Kartu pengunjung terdiri dari beberapa warna yang menunjukkan kondisi tertentu, misalnya warna kuning apabila pengunjung telah memenuhi syarat screening kesehatan dan warna hitam apabila pengunjung tidak dapat menyerahkan/ menunjukkan hasil tes antigen/PCR negatif Covid-19;
- Dalam kondisi tertentu, pengunjung yang tidak membawa hasil tes antigen/PCR dapat melakukan *rapid test* pada klinik PPSDM Migas;
- Frontliner* mampu bersikap profesional dan tidak meminta tips atau pemberian apapun dari pengunjung dan menolak apabila ada pengunjung yang melakukan hal tersebut.



Fasilitas Fisik yang Mendukung Pembangunan Zona Integritas

Jenis layanan publik yang diberikan oleh PPSDM Migas adalah Pengujian laboratorium bidang kemigas, Pelatihan, Sertifikasi, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa. Oleh karena itu, fasilitas fisik yang mendukung adalah salah satu kunci kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan yang dilaksanakan di lingkungan kantor PPSDM Migas. Fasilitas fisik yang tercatat dan diobservasi oleh Tim Ditjen Ketenagalistrikan, antara lain:

- Denah lokasi PPSDM Migas dalam papan pengumuman yang diletakkan dekat gerbang masuk PPSDM Migas untuk memudahkan pelanggan mengetahui lokasi tempat yang mereka tuju;
- Totem penunjuk arah, informasi nama tempat/ruangan, area merokok/bebas merokok, pengingat protokol kesehatan, dan lainnya;
- Banner, yang terdiri dari: banner informasi layanan publik, banner pengawasan/wilayah anti korupsi, banner budaya kerja, dan banner protokol Kesehatan, dan lainnya;
- Papan informasi, yang terdiri dari papan informasi SOP/ alur prosedur layanan publik, papan informasi peraturan keselamatan kerja, papan informasi daftar harga layanan publik;
- Ruang pelayanan publik yang disebut Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), yaitu tempat pelanggan mencari informasi atau melakukan pendaftaran pelatihan, sertifikasi, dan PKL mahasiswa;
- Pedestrian, kursi taman, gazebo, wastafel dalam ruang terbuka hijau bagi pelanggan yang beristirahat sejenak;
- Free Shuttle* bus untuk mengantar peserta pelatihan, sertifikasi, dan PKL mahasiswa ke lokasi-lokasi kelas pelatihan/ujian sertifikasi/site PKL yang terpisah dari Gedung utama PPSDM Migas di Jalan Sorogo;
- Area bermain anak di dekat gedung PTSA untuk pelanggan yang membawa keluarga;
- Nursery room*/ruang laktasi dalam Gedung PTSA untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;

- Open space* untuk pertemuan antara pejabat pengadaan PPSDM Migas dengan vendor/supplier barang/jasa atau pegawai PPSDM Migas ketika menerima tamu, yang dilengkapi dengan CCTV;
- Marketing room* dengan nuansa yang santai dan kekinian dengan kursi bean bag dan meja pendek untuk melayani kerjasama pelatihan dan ujian sertifikasi dengan institusi pelanggan;
- Ujian tertulis sertifikasi dengan mengadopsi *Computer Assisted Test* (CAT), dimana ujian dilakukan secara *online* dan hasil ujian dapat langsung keluar hasilnya setelah peserta melakukan submit seluruh jawaban. Hal ini untuk menghindari adanya potensi kecurangan dan rekayasa nilai ujian;
- Terdapat fasilitas *free wifi* bagi pelanggan pada area-area tertentu serta akses terhadap saklar listrik untuk charge HP/ laptop.

Peningkatan Komponen Pengungkit

PPSDM Migas mengusulkan penilaian WBBM pertama kali pada tahun 2019 dan belum memenuhi syarat, yang disebabkan oleh persentase nilai area penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik masing-masing dibawah 75%, jumlah nilai komponen pengungkit kurang dari 48, dan total nilai komponen pengungkit ditambah hasil kurang dari 85. Selain itu, pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam manajemen kinerja masih belum optimal, implementasi sistem pengawasan belum dilakukan secara sistemik, dan pemanfaatan teknologi masih belum dilakukan pada seluruh jenis layanan.

Pada tahun 2020, PPSDM Migas mampu memperbaiki catatan tersebut dengan nilai komponen pengungkit sebesar 48,20 dan total nilai komponen pengungkit ditambah hasil sebesar 86,22. Adapun hal-hal yang dilakukan pada masing-masing area komponen pengungkit antara lain:

- Dilakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas yang disampaikan oleh Kepala PPSDM Migas kepada pegawai melalui komunikasi dua arah, yang melibatkan seluruh jajaran manajemen dan agen perubahan. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh PNS dan Non-PNS PPSDM Migas. Khusus bagi *frontliner*, dilakukan perubahan *mindset* dan budaya kerja *no-tips* secara langsung oleh pimpinan PPSDM Migas;
- Sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada *stakeholder* dan masyarakat melalui FGD, kegiatan kemasyarakatan, media sosial, surat pemberitahuan, media *online* dan cetak, *banner*, *flyer*, dan *leaflet*.

- c. Apresiasi terhadap kinerja pegawai yang diselenggarakan setahun sekali, dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SK Kepala PPSDM Migas tentang *Reward and Punishment* Kegiatan Pelayanan pada PPSDM Migas, yang dikaitkan dengan sistem remunerasi;
- d. Penataan tata laksana difokuskan pada pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem kerja dan pelayanan PPSDM Migas
- e. *Internal Mystery Shopper* Wasiat Raja (Pengawasan Internal Rahasia dan Terjaga), yakni tim *mystery shopper* dari internal PPSDM Migas sendiri yang ditunjuk langsung oleh Kepala PPSDM Migas untuk melakukan penggalan informasi kepada pelanggan eksternal maupun internal PPSDM Migas terkait kualitas pelayanan yang diberikan PPSDM Migas serta potensi tindak gratifikasi. Saat evaluasi ZI oleh KemenPAN dan RB, Wasiat Raja menjadi inovasi unggulan PPSDM Migas;
- f. Pengawasan terintegrasi pada ujian sertifikasi dengan penggunaan sistem informasi uji kompetensi/ujian sertifikasi, untuk memastikan tidak terjadi rekayasa nilai yang diberikan oleh asesor penguji.
- g. Kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti penanaman 5000 pohon di Ecopark, bantuan air bersih pada warga sekitar PPSDM Migas, layanan klinik PPSDM Migas, dll.



Arah Penguatan Zona Integritas PPSDM Migas

Untuk mempertahankan predikat WBK dan WBBM, tahun 2021 ini PPSDM Migas melakukan penguatan Zona Integritas, seperti pengembangan sistem informasi arsip digital, pembangunan studio mini untuk mendukung pelatihan *online*, membuka klinik utama "Bhina Migas Medical Center" untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendukung program vaksinasi merdeka bagi masyarakat Cepu. Selain itu PPSDM Migas juga meraih juara III pada Lomba Hemat Energi Gedung Perkantoran Kementerian ESDM.

Lesson-Learned penilaian WBBM PPSDM Migas

Untuk mewujudkan inovasi dan perbaikan pada komponen pengungkit dan hasil dalam penilaian pembangunan Zona

Integritas, komitmen pemimpin sebagai role model dan secara berkala melakukan peninjauan langsung dan berdialog langsung dengan pelaksana memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perubahan perilaku dan budaya kerja pegawai. Selain itu, perlu dilakukan penjadwalan bagi masing-masing tim RB/ZI sesuai area perubahan masing-masing untuk bertemu secara rutin dan menyelesaikan target program kerja RB/ZI. Kemudian sempat dijelaskan oleh Koordinator Tata Usaha PPSDM Migas bahwa dalam tim kerja pelaksanaan RB/ZI, terdapat tim gerak cepat yang memiliki fungsi spesifik masing-masing sebagai konseptor, eksekutor, data kolektor, dan evaluator, sehingga proses eksekusi suatu program menjadi efektif. Dapat disimpulkan bahwa roh penggerak pembangunan Zona Integritas PPSDM Migas dimulai dari kepemimpinan yang efektif, konsistensi Agen Perubahan beserta Tim Pelaksana RB/ZI untuk melaksanakan program, dalam suasana kerjasama tim yang kondusif dan produktif.

Kesimpulan dan Penutup

Sejak ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) beberapa tahun yang lalu, PPSDM Migas telah menjadi unit yang mandiri dalam melakukan pembenahan terhadap layanan publik yang diberikan. Predikat WBK pada tahun 2018 dan WBBM pada tahun 2020 adalah penghargaan atas pembenahan dan reformasi yang dilakukan pada PPSDM Migas. Hal ini juga ditambah dengan peningkatan profesionalitas ASN PPSDM Migas yang didukung oleh sistem remunerasi berdasarkan kinerja yang terukur dan adanya sistem reward and punishment terhadap pelaksanaan layanan publik. Disisi lain, layanan publik yang diberikan PPSDM Migas dan Ditjen Ketenagalistrikan memiliki perbedaan karakteristik, dimana layanan publik Ditjen Ketenagalistrikan lebih banyak berupa konsultasi dan perizinan.

Namun demikian, dapat disepakati bahwa hal-hal yang sama-sama diperlukan baik oleh PPSDM Migas dan Ditjen Ketenagalistrikan dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas adalah (1). peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh garda terdepan (*frontliner*), (2) peningkatan fasilitas fisik untuk mendukung pelayanan sekaligus media sosialisasi dan marka-marka yang dapat menjadi pengingat dan dengan sendirinya akan terinternalisasi dalam *mindset* pegawai dan *stakeholder*, (3). pengembangan sistem informasi dan SPBE dalam proses internal maupun pelayanan publik, (4). melakukan inovasi untuk peningkatan komponen pengungkit dan hasil dalam penilaian Zona Integritas, dan (5). Peningkatan peran Ditjen Ketenagalistrikan bagi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik.

Penulis: Malika Alia Rahayu – Agen Perubahan Ditjen Gatrik

DAFTAR REGULASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2021

No	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK	Status
1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
2	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral	
3	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah	Mencabut Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
4	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 Tentang Instalasi Ketenagalistrikan
5	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	• Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 Tentang Instalasi Ketenagalistrikan
6	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	• Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 Tentang Instalasi Ketenagalistrikan
7	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan Dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda Keselamatan	• Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Yang Terdaftar di ASEAN • Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan
8	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik Dan Alat Penyalur Daya Listrik Bagi Masyarakat Di Daerah Sulit Dijangkau Dengan Jaringan Tenaga Listrik	
9	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	• Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik. • Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
10	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	• Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
11	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	• Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
12	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	• Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, Dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara • Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum • Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan • Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika

DAFTAR REGULASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2021

No	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK	Status
		<ul style="list-style-type: none"> Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2017 Tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.
13	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/Hk.02/Mem.M/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/Mg.04/Mem.M/2021 Tentang Harga Gas Bumi Tertentu Di Pembangkit Tenaga Listrik (<i>Plant Gate</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mengubah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu Di Pembangkit Tenaga Listrik (<i>Plant Gate</i>)
14	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/Mg.04/Mem.M/2021 Tentang Harga Gas Bumi Tertentu Di Pembangkit Tenaga Listrik (<i>Plant Gate</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91 K/12/MEM/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (<i>Plant Gate</i>) Diubah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu Di Pembangkit Tenaga Listrik (<i>Plant Gate</i>)
15	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 K/HK. 02/MEM.L/2021 tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam rangka Menghadapi Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	
16	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 169.K/Hk.02/MEM.M/2021 Tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2020	
17	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/Hk.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030	Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2028
18	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/Hk.02/Mem.S/2021 Tentang Penetapan Faktor Emisi Gas Rumah Kaca Sistem Ketenagalistrikan	

WASPADA Omicron, VARIAN BARU Covid-19

TAAT PROTOKOL KESEHATAN!
SEGERA VAKSIN!

JAGA

diri
keluarga
Indonesia



Sumber: Freepik.com

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

memasukkan virus corona varian B.1.1.529 atau Omicron ke dalam variant of concern (VoC). Ayo kita semua waspada dengan terus menerapkan protokol kesehatan.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.gatrik.esdm.go.id